

**PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK PADA DPD PARTAI PERINDO DI  
KABUPATEN KEDIRI**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Meperoleh Gelar Sarjana Ilmu  
Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Peminatan  
Governance dan Transisi**

**ANGGIK HARIADI**

**Nim. 105120507111004**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2017**



**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI  
PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK PADA DPD PARTAI PERINDO DI  
KABUPATEN KEDIRI**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Anggik Hariadi**

**NIM.105120507111004**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing :

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**Tri Hendra Wahyudi, S.IP., M.IP**

**NIK. 2013098007071001**

**M. Fajar Shodiq Ramadlan, S.IP, M.IP**

**NIDN. 0023048901**



**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI  
PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK PADA DPD PARTAI PERINDO DI  
KABUPATEN KEDIRI**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Anggik Hariadi**

**NIM.105120507111004**

**Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana pada tanggal 25 Juli  
2017**

**Tim Penguji :**

**Ketua Sidang**

**Sekretaris Sidang**

**Tri Hendra Wahyudi, S.IP., M.IP**  
**NIK. 2013098007071001**

**M. Fajar Shodiq Ramadlan, S.IP, M.IP**  
**NIDN. 0023048901**

**Anggota Penguji 1**

**Anggota Penguji 2**

**Taufik Akbar, S.IP., M.IP**  
**NIDN. 0004118503**

**Ahmad Hasan Ubaid, S.IP., M.IP**  
**NIK. 2016078204211001**

**Malang, 25 Juli 2017**

**Dekan,**

**Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE, M.Si., Ak**  
**NIP. 196908141994021001**

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggik Hariadi

NIM : 115120507111004

Jurusan / Peminatan : Ilmu Politik / Governance and Transisi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul

**“PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK PADA DPD PARTAI PERINDO  
KABUPATEN KEDIRI ”** merupakan karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya  
saya, diberi tanda dan citasi yang ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang tidak benar dan  
ditemukan pelanggaran atas skripsi, maka saya bersedia menerima sanksi  
akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh

Malang, 25 Juli 2017

Anggik hariadi  
115120507111004



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP***Curriculum Vitae***I. Data Pribadi**

1. Nama : ANGGIK HARIADI
2. Tempat dan Tanggal Lahir : KEDIRI, 04 NOVEMBER 1992
3. Jenis Kelamin : LAKI LAKI
4. Agama : ISLAM
5. Status Pernikahan : BELUM MENIKAH
6. Warga Negara : INDONESIA
7. Alamat KTP : DSN.SUMBER MULYO  
DESA.MEJONO . RT03/RW03  
KEC.PLEMAHAN  
KAB.KEDIRI  
PROV.JAWATIMUR
9. Nomor Telepon / HP : 082232672403
10. e-mail : ANGGIKHARIADI@YAHOO.COM
11. Kode Pos : 64155

**II. Pendidikan Formal**

| PERIODE | Sekolah / Institusi / Universitas | Jurusan      |
|---------|-----------------------------------|--------------|
|         | SDN MEJONO                        | -            |
|         | SMPN 1 PLEMAHAN                   | -            |
| 2007    | SMA N PURWOASRI                   | IPS          |
| 2010    | UNIV.BRAWIJAYA                    | ILMU POLITIK |



**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “Pelebagaan Politik DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) kabupaten kediri”. Penelitian ini berfokus pada pelembagaan partai politik yang ditinjau dari empat aspek, yaitu mengenai akar partai di masyarakat, otonomi, keorganisasian partai politik serta dengan koherensi yang ada di partai politik, serta sistem rekrutmen yang dilakukan partai politik pada DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini menggunakan kelembagaan partai politik serta konsep rekrutmen partai politik.

Hasil dari penelitian ini mencakup antara lain : (1) Pelebagaan DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri yang meninjau dari empat aspek yaitu : akar partai dimasyarakat, otonomi, keorganisasian Partai Politik, Koherensi sudah mulai berjalan seperti yang diharapkan namun masih ada kekurangan seperti pendanaan partai, masih banyak masyarakat yang belum mengerti adanya partai perindo di kabupaten kediri; (2) Untuk saat ini DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri masih terus menambah anggotanya untuk lolos verifikasi yang dilakukan oleh KPU; (3) Kendala yang dihadapi terjadi pada sistem rekrutmen yang mencakup kaderisasi sehingga sampai saat ini masih belum menerima pendidikan politik bagi pengurus.

**Kata Kunci : Pelebagaan, Kaderisasi, Partai Politik**



**ABSTRACT**

The titled of this research is “The political institutionalization DPD of PERINDO parties on Kediri district” this research focuses of institutionalization of political parties in term of 4 (four) aspects,namely about the parties root in community, autonomy, the organizatiton of political parties and than coherence in the political parties, and the last recruitment of system by political parties in SPERINDO parties DPD of kediri district

This method used of the research is qualitative method is descriptive with data collection technique and using interviews & theoretical documentation used in doing this research using the institutionalization of partical parties with the recruitment concept of political parties.

The result of this research is (1). The institutional of political parties DPD Perindo in district Kediri on term of Four aspects namely about : the parties root in community , autonomy, the organization of political parties. The conherence has doing as expected but there are still deficiency as funding of parties. Many of community cant to knowing by the Perindo Parties in Kediri district. (2). By this time parties political of DPD Perindo in Kediri district and the cotinue will keep adding the members to pass the verification by KPU. (3). The obstacles faced by recruitment system that encompassing the regeneration so that until now still havent received political education for the board.

Keyword : Institutionalization, Regeneration, political parties



**KATA PENGANTAR**

Puji serta syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT., atas segala rahmat, karunia, serta hidayahNya yang telah dilimpahkan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:

**PELEMBAGAAN ANGGOTA PARTAI DI DPD PARTAI PERINDO  
KABUPATEN KEDIRI**

Penelitian berdasarkan pelembagaan anggota partai yang terjadi di DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang disusun dalam upaya untuk menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik Universitas Brawijaya.

Peneliti tidak lupa untuk menghaturkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu peneliti mulai dari awal penyusunan skripsi hingga akhir yang antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak., selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
2. Bapak Tri Hendra Wahyudi, S.IP., M.IP., selaku pembimbing utama, serta Bapak M. Fajar shodiq Ramadlan.,S.IP.,M,IP selaku pembimbing pendamping atas segala perhatian dan bimbingan serta arahan-arahan yang diberikan kepada peneliti dalam upaya menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh dosen dan staff program studi ilmu politik.
4. Keluarga besar peneliti terutama Ibu tercinta Siti Rohayati, dan Bapak Riadi serta adik-adik Estiti Hariadi serta Hindarti Hariadi, serta keluarga besar atas dukungan dan dorongan doa, motivasi, serta materi selama ini yang melancarkan berbagai kegiatan peneliti mulai dari awal hingga akhir masa perkuliahan.



5. Keluarga besar ilmu politik angkatan 2009, 2010, dan 2011 dan sahabat tercinta khususnya saudara, Endah Suciati/Ace, Lintang Fikriyah, Aditya Wicaksono, Fadhil Inong, Hendro Tri, M. Yudin, Dimas B., Firdaus Syamsudin, Moch. Hendro Susilo, Alam, Daud dan semuanya yang telah mengisi dan mewarnai masa-masa kuliah peneliti menjadi amat berarti dan menyenangkan.

Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi ilmu politik yang berorientasi pada permasalahan pertahanan dan keamanan.

Malang, Juli 2017

Peneliti,  
Anggik Hariadi



DAFTAR ISI

Halaman

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Lembar Persetujuan.....              | i                        |
| Lembar Pengesahan.....               | ii                       |
| Kata Pengantar.....                  | iii                      |
| Daftar Isi.....                      | iv                       |
| Daftar Tabel dan Gambar.....         | v                        |
| Abstraksi.....                       | vi                       |
| <b>BAB I</b>                         | <b>PENDAHULUAN</b>       |
| 1.1.Latar Belakang.....              | 1                        |
| 1.2.Rumusan Masalah.....             | 8                        |
| 1.3.Tujuan Penelitian.....           | 9                        |
| 1.4.Manfaat Penelitian.....          | 9                        |
| <b>BAB II</b>                        | <b>TINJAUAN PUSTAKA</b>  |
| 2.1.Tinjauan Teoritik.....           | 11                       |
| 2.1.1.Pendekatan Kelembagaan.....    | 11                       |
| 2.1.2.Pelebagaan Partai Politik..... | 14                       |
| 2.1.3.Rekrutmen.....                 | 19                       |
| 2.2.Partai Politik.....              | 28                       |
| 2.3.Penelitian Terdahulu.....        | 31                       |
| 2.4.Alur Pikir Penelitian.....       | 34                       |
| <b>BAB III</b>                       | <b>METODE PENELITIAN</b> |
| 3.1.Jenis Penelitian.....            | 37                       |







|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 3.2. Penetapan Lokasi Penelitian..... | 38 |
|---------------------------------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 3.3. Fokus Penelitian..... | 39 |
|----------------------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 3.4. Pemilihan Informan..... | 39 |
|------------------------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 3.5. Pengumpulan Data..... | 40 |
|----------------------------|----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 3.6. Teknik Analisis Data..... | 42 |
|--------------------------------|----|

|   |    |
|---|----|
| 3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data..... | 45 |
|---|----|

**BAB IV GAMBARAN UMUM**

|  |    |
|--|----|
| 4.1. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)..... | 47 |
|--|----|

|  |    |
|--|----|
| 4.1.1. Visi dan Misi Partai Perindo..... | 47 |
|--|----|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 4.1.2. Platform Partai Perindo..... | 50 |
|-------------------------------------|----|

|  |    |
|--|----|
| 4.1.3. Makna Lambang Partai Perindo..... | 52 |
|--|----|

|   |    |
|---|----|
| 4.1.4. Sejarah DPD Perindo Kabupaten Kediri | 53 |
|---|----|

|   |    |
|---|----|
| 4.1.5. Struktur DPD Perindo Kabupaten Kediri. | 55 |
|---|----|

|   |    |
|---|----|
| 4.1.6. AD/ART DPD Perindo Kabupaten Kediri. | 56 |
|---|----|

|   |    |
|---|----|
| 4.1.7. Garis Koordinat Partai Perindo Kab. Kediri | 57 |
|---|----|

|   |    |
|---|----|
| 4.2. Rekrutmen DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri. | 58 |
|---|----|

|  |    |
|--|----|
| 4.2.1. Strategi Dalam Merekrut Calon Anggota | 59 |
|--|----|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 4.2.2. Sasaran yang Dituju..... | 60 |
|---------------------------------|----|

**BAB V Pelembagaan DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri**

|   |    |
|---|----|
| 5.1. Pelembagaan DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri. | 61 |
|---|----|

|  |    |
|--|----|
| 5.1.1. Akar Partai Perindo Kabupaten Kediri..... | 61 |
|--|----|





|  |    |
|--|----|
| 5.1.2.Otonomi Partai Politik.....                      | 64 |
| 5.1.3.Keorganisasian Partai Politik.....               | 65 |
| 5.1.4.Koherensi Partai Politik.....                    | 66 |
| 5.1.5.Kendala Pelembagaan DPD Perindo.....             | 68 |
| 5.2.Rekrutmen DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri..... | 69 |
| 5.2.1.Kendala Rekrutmen Partai Politik.....            | 76 |
| <b>BAB VI Penutup</b>                                  |    |
| 6.1. Kesimpulan.....                                   | 78 |
| 6.2.Saran.....   | 80 |







DAFTAR TABEL

Tabel ..... halaman

2.3. Daftar Tabel ..... 36

DAFTAR GAMBAR

Gambar ..... halaman

2.4. Alur Pikir Penelitian ..... 37

4.1.5. Struktur DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri ..... 54





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Sebagai aktor dalam negara demokrasi, partai politik menjadi sebuah wadah bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.<sup>1</sup> Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Partai politik juga sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan (*values and interests*) dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara, proses-proses pengambilan keputusan bernegara maupun hubungan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan.

Keberadaan partai politik tidak terlepas dari fungsi yang menjadi tanggung jawab partai politik untuk menjalankannya. Secara umum fungsi partai politik yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik, partisipasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan serta pembuat kebijakan.<sup>2</sup> Salah satu fungsi partai politik yang berkaitan dengan sistem demokrasi adalah seleksi pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang disebut rekrutmen politik. Seperti yang diungkapkan oleh pakar politik Ramlan Surbakti bahwa rekrutmen politik mencakup pemilihan, seleksi, dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Budiardjo, Miriam, 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 397.

<sup>2</sup> Suprihatini, Amin, 2008. *Partai Politik di Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih, hlm. 19

<sup>3</sup> Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. hlm. 113.



Menurut Almond dan Coleman fungsi partai politik adalah berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam artian mendudukkan orang-orang nya menjadi pejabat pemerintah, sehingga dapat turut serta mengambil atau menentukan keputusan politik ataupun output pada umumnya.<sup>4</sup> Hal ini sesuai dengan proses rekrutmen yang berarti proses pengisian jabatan-jabatan politik pada lembaga-lembaga politik, termasuk jabatan dalam birokrasi atau administrasi negara dan partai-partai politik. Rekrutmen politik merupakan fungsi yang penting bagi kontinuitas dan kelestarian partai politik yang berguna untuk mencetak pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang berkualitas.

Partai politik tanpa kaderisasi tidak berarti apa-apa, hukum alamnya manusia akan mengalami tua dan penurunan daya kemampuan, begitu juga dengan partai politik diperlukan regenerasi. Untuk mendapatkan regenerasi yang baik maka dibutuhkan proses rekrutmen dan kaderisasi yang professional, akomodatif, transparan, jujur, serta mengacu pada kaidah-kaidah atau regulasi yang menjadi aturan dalam sistem kepartaian yang dianut partai politik

Sistem rekrutmen akan berjalan dengan baik jika semua pihak yang saling terkait dapat bekerjasama dalam menjalankan aturan main yang sudah menjadi kesepakatan untuk dilaksanakan dengan baik. Dibutuhkan kerjasama antara pihak yang melakukan pengkaderan terhadap anggota baru partai, yaitu pihak yang diajak untuk menjadi kader maupun unsur pendukung lainnya yang dibutuhkan, misalnya pemberian materi yang mampu membentuk pola berpikir dan bekerja seorang kader sesuai dengan tujuan partai politik yang bersangkutan. Bila partai politik mampu menghasilkan kader partai yang berkualitas, berarti partai politik mampu menyediakan pemimpin untuk masa depan atau regenerasi partai berjalan dengan baik. Apabila proses rekrutmen dan kaderisasi tidak berjalan dengan baik, maka dapat dikatakan terjadi stagnasi atau kemandegan dalam regenerasi partai. Kemandegan proses kaderisasi dalam partai politik ini telah menimbulkan kekecewaan di banyak kalangan.

---

<sup>4</sup> Almond, Gabriel A. and Coleman, James S. 1966. *The Politics of Developing Areas*. News Jersey: Princeton University Press dalam Sudijono, Sastroatmodjo. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press. hlm. 115



Kekecewaan ini ditunjukkan dengan sikap apatis terhadap partai, keinginan pembentukan partai politik baru yang diawali dari munculnya berbagai LSM atau ormas, dan yang paling mutakhir adalah dikeluarkannya keputusan oleh Mahkamah Konstitusi yang mendukung munculnya calon perseorangan di dalam proses politik di Indonesia, meskipun hal ini tidak dimungkinkan untuk calon anggota legislatif.

Dikatakan sebuah rekrutmen berhasil ketika dari proses rekrutmen tersebut mampu menciptakan pribadi yang tangguh dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap partai, sehingga antara kader dan partai merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan mampu menjadi solusi dari masalah-masalah yang muncul bagi partai dikemudian hari. Keberhasilan partai politik dalam proses rekrutmen politik yang bisa menghasilkan kader-kader yang handal akan dengan sendirinya menghapuskan kekecewaan publik

Namun disisi lain, ditengah pertumbuhan partai politik di Indonesia, dalam pelaksanaan rekrutmen politik, sering ditemukan fenomena yang dianggap sebagai “kecurangan”, seperti adanya hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan, atau kepentingan pribadi sehingga seseorang mudah menjadi pengurus partai. Fenomena seperti itu dikenal dengan sebutan kader karbitan atau kader titipan. Tidak jarang pula demi kepentingannya, kader suatu partai pindah ke partai lain yang disebut kader loncatan.

Dalam pengkaderan, ada dua persoalan yang penting. Pertama, bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk peningkatan kemampuan baik keterampilan maupun pengetahuan. Kedua, adalah kemampuan untuk menyediakan kader atau sumberdaya manusia. Ini merupakan bentuk pendidikan politik, dimana selama ini peran tersebut terabaikan. Namun yang banyak terjadi sekarang ini adalah proses rekrutmen yang tidak memenuhi kaedah-kaedah tertentu yang dilakukan lazimnya oleh partai politik, dapat dilihat bahwa parpol tidak menseleksi secara ketat siapa-siapa yang akan dijadikan wakil rakyat



nantinya. Para pemimpin partai politik besar di Indonesia kerap berasal bukan dari kualifikasinya, melainkan dari unsur “kebangsawanan” tertentu.<sup>5</sup>

Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda, di mana pola rekrutmen anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya.<sup>6</sup> Pembahasan menarik tentu tentang peran dan fungsi pemerintah memposisikan dirinya secara proporsional dan juga kemampuan partai untuk mengatur dirinya sendiri dan kemampuan untuk mempertahankan domain perannya dari intervensi kekuasaan. Persoalan kaderisasi dikatakan sebagai persoalan penting karena sesungguhnya di dalam partai perlu digodok calon pemimpin lokal maupun nasional yang memiliki visi demokrasi dan bermental jujur.<sup>7</sup> Untuk itu sangat perlu dan mendesak bagi partai politik untuk segera memikirkan langkah-langkah strategis yang bisa merubah keadaan ini. Partai politik harus segera melakukan perombakan mendasar terhadap sistem rekrutmen politik sehingga bisa mendukung proses kaderisasi pemimpin nasional.

Idealnya sebuah partai politik menominasikan calon anggota legislatif (caleg) yang telah bergabung dengan partai politik beberapa tahun sebelum pemilu.<sup>8</sup> Dengan demikian proses inisiasi sang calon anggota legislatif dengan partai politik telah berlangsung dengan selaras. Partai politik mengenal calon anggota legislatif tersebut dengan baik, dan calon legislatif pun telah menyatu dengan ideologi, visi, misi dan program kerja partai politik. Calon anggota legislatif seharusnya tersaring melalui mekanisme dan proses perekrutan berdasarkan kriteria yang demokratis, objektif, terukur, memperhatikan keahlian atau kompetensi, dan bebas dari korupsi, gratifikasi, kolusi dan nepotisme dengan alasan ketika calon anggota legislatif harus memperjuangkan visi, misi, dan program partai politik sang calon tidak merasa dilematis karena telah mengetahui konsekuensi telah menjadi bagian dari partai politik.

<sup>5</sup> Koirudin, 2004. *Parpol dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm.5

<sup>6</sup> Fadillah Putra, 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 19

<sup>7</sup> Koirudin, Op.cit, hlm.12

<sup>8</sup> [www.academia.edu/6790447/Kaderisasi\\_Dan\\_Penetapan\\_Caleg\\_Partai](http://www.academia.edu/6790447/Kaderisasi_Dan_Penetapan_Caleg_Partai), diakses 20 April, 2016



Partai Perindo yang berasaskan Pancasila ini dibentuk oleh Hary Tanoesoedibjo yang merupakan partai baru dalam ranah politik akan memerlukan kader-kader yang berkualitas untuk membuat Partai Perindo tidak akan dipandang sebelah mata oleh kader-kader partai politik lainnya. Pembentukan partai ini bukan karena tiba-tiba, melainkan telah disiapkan jauh-jauh hari dalam bentuk ormas Perindo yang telah di deklarasikan di Jakarta pada 24 Februari 2013 oleh Hary Tanoesoedibjo bersama dengan tokoh nasional lainnya. Dengan mengungkap konsep “kembali ke tujuan berbangsa dan bernegara”<sup>9</sup> Partai Perindo bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia dengan fokus pada perbaikan secara signifikan kondisi ekonomi untuk meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperluas lapangan pekerjaan, pelayanan pendidikan yang semakin merata, bermutu dan terjangkau, serta pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang memadai, sehingga secara keseluruhan kebijakan partai dapat meningkatkan taraf hidup rakyat yang lebih layak sehingga sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Meski sebagai partai politik yang baru, Partai Perindo telah memiliki badan hukum yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.AH.11.01 tahun 2014 tertanggal 08 Oktober 2014.<sup>10</sup> Dengan status badan hukum, berarti satu tahapan verifikasi yang wajib diikuti partai Perindo telah usai dilewati.

Tahap selanjutnya yang harus dilewati adalah proses verifikasi yang dilakukan KPU lolos sebagai partai politik peserta pemilu.

Kehadiran Partai Perindo merupakan metamorfosa sekaligus transformasi dari Ormas Perindo sebelumnya yang mengusung tema besar mewujudkan Indonesia yang mengunggulkan tema besar untuk mewujudkan Indonesia yang berkemajuan, bersatu, adil, makmur, sejahtera,

<sup>9</sup> Fahmi Firdaus, “Konsep Perindo: kembali ke Tujuan Berbangsa & Bernegara”, <http://news.Okezone.com/read/2015/12/25/337/1274621/konsep-perindo-kembali-ke-tujuan-berbangsa-bernegara>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2016

<sup>10</sup> Abdul Khaliq, “Mengenai Platform Partai Perindo”, <http://nasional.sindonews.com/read/960819/18/mengenai-platform-partai-perindo-1423193546/1>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2016



berdaulat, bermatabat dan berbudaya.<sup>11</sup> Partai Perindo dengan jargonya “bersatu memimpin bangsa” setidaknya mampu memberikan bukti jawaban atas kegundahan publik selama ini, utamanya rakyat yang apatis terhadap keberadaan partai politik. Namun dengan tekad yang kuat untuk menjadi pemenang, Partai Perindo tidak menganggap partai politik lainya sebagai pesaingnya. Partai Perindo sangat menyadari bahwa upaya untuk membangun dan membenahi berbagai persoalan bangsa Indonesia akan dapat dilakukan melalui kerja sama yang melibatkan seluruh elemen bangsa.

Partai juga harus mampu memulihkan kembali kepercayaan publik yang merosot terhadap partai politik. Partai juga harus mampu memenuhi persyaratan dan regulasi kepesertaan yang semakin ketat, mampu menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan kompeten serta mampu menyiapkan dukungan logistik dan infrastruktur partai yang memadai. Dalam hal ini menarik bagi penulis melihat bagaimana pola rekrutmen partai perindo yang ada di kabupaten kediri, dalam hal ini peneliti memilih kabupaten kediri karena di kabupaten kediri banyak bermunculan partai partai baru dan salah satunya perindo yang ingin memperoleh banyak dukungan dari masyarakat kabupaten kediri serta partai perindo adalah partai yang belum pernah mengikuti pemilu yang ada di indonesia saat ini dengan begitu partai perindo bertekat untuk meyakinkan masyarakat kediri bahwa partai perindo tidak hanya ingin hanya lewat saja. Dengan tekad yang kuat partai perindo yakin mampu bersaing dengan partai besar yang ada di kabupaten kediri dan mampu memperoleh suara dalam pemilihan pemilu yang akan datang serta untuk mempersiapkan calon anggota yang berkuaitas untuk mampu bersaing di dunia politik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana rekrutmen yang dijalankan oleh partai perindo dalam menyiapkan kadernya sebagai anggota legislatif. Tantangan lain yang sangat tidak kalah pentingnya di lakukan di kabupaten kediri, karena pada dasarnya

---

<sup>11</sup> Mardiansyah, “Perindo: Menggagas Politik Kesejahteraan”, <http://nasional.sindonews.com/read/964314/18/perindo-menggagas-politik-kesejahteraan-1423880499/1>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2016



kabupaten Kediri berada di tengah-tengah provinsi Jawa Timur dan menurut penulis menilai bisa di jadikan basis masa di Jawa Timur, melihat dari segi warga yang masih menengah ke bawah. Serta Partai Perindo Di Kabupaten Kediri masih baru berjalan empat bulan, dan strategi ini dilakukan partai perindo dengan membantu usaha masyarakat untuk menjadikan massa. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian ini diberi judul **“Proses Rekrutmen Calon Anggota Partai Pada DPD Partai Perindo Di Kabupaten Kediri”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah substansi masalah yang akan diteliti dalam sebuah penelitian.<sup>12</sup> Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian tentang Pelembagaan Dan Kaderisasi Partai Politik Dalam Menetapkan Calon Anggota Legislatif Pada DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelembagaan yang dilakukan pada DPD Partai Perindo di Kabupaten Kediri ?
2. Pola Rekrutmen calon anggota politik DPD Partai Perindo di Kabupaten Kediri ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

<sup>12</sup> Prastowo, Andi, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, Cetakan II, hlm.138



Merujuk dari fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan dari dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi Pelembagaan dan rekrutmen politik yang dilakukan DPD Partai Perindo di Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam rekrutmen politik DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian serta studi lebih lanjut terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang politik serta sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki arah permasalahan yang sama.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan atau umpan balik khususnya DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri dalam menentukan kebijakan atau arah partai terkait dengan pelaksanaan pelembagaan dan kaderisasi untuk mendapatkan kader-kader yang berprofesional, berintegritas serta memiliki kompetensi di bidang politik untuk mengisi posisi yang strategis baik di lembaga legislatif maupun eksekutif.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Teoritik

Dalam bagian ini, akan dijelaskan bagaimana mengenai tinjauan teoritik yang digunakan untuk penelitian skripsi. Tinjauan teoritiknya menggunakan teori *Pendekatan Partai Politik* yang digunakan untuk menganalisa pelebagaan dalam DPD partai Perindo di Kabupaten Kediri. Dalam penelitian ini akan ditinjau dalam berbagai aspek yang mencakup pelebagaan.

##### 2.1.1 Pendekatan Pelebagaan

Pendekatan pelebagaan adalah suatu subjek masalah yang mencakup peraturan, prosedur dan organisasi formal pemerintahan. Pendekatan ini memakai alat-alat ahli hukum dan sejarah untuk menjelaskan batas-batas pada perilaku politik maupun efektifitas demokratis.<sup>1</sup> Pendekatan ini memfokuskan institusi negara sebagai kajian utama, bagaimana organisasi institusi itu, apa tanggung jawab dari setiap perannya, dan bagaimana institusi itu berinteraksi. Negara sebagai pusat kekuasaan (*state power centre*) merupakan inti dari pendekatan institusional. Pendekatan institusionalisme berkembang pada abad ke-19, dimana belum terjadi perang dunia dan peran negara sangat dominan dalam kehidupan masyarakat. Fokus dari pendekatan ini adalah segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasan tradisionalanya menyangkut undang-undang, kedaulatan, kedudukan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga negara.

Setidaknya, ada lima karakteristik atau kajian utama pendekatan ini, yakni:

<sup>1</sup> David Marsh and Garry Stoker, *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*, terj, (New York: Palgrave MacMillan, 2002), hal. 109.



1. Legalisme (legalism), yang mengkaji aspek hukum, yaitu peranan pemerintah dalam mengatur hukum.
2. Strukturalisme, yakni berfokus pada perangkat kelembagaan utama atau menekankan pentingnya keberadaan struktur dan struktur itu pun dapat menentukan perilaku seseorang.
3. Holistik (holism) yang menekankan pada kajian sistem yang menyeluruh atau holistik dalam artian lembaga eksekutif, legislative maupun yudikatif digunakan dalam pengkonsepian idealnya.
4. Sejarah atau historicism yang menekankan pada analisisnya dalam aspek sejarah seperti kehidupan sosial-ekonomi dan kebudayaan.
5. Analisis normatif atau normative analysis yang menekankan analisisnya dalam aspek yang normatif sehingga akan terfokus pada penciptaan good government.

Pendekatan institusionalisme dibagi menjadi dua yaitu institusionalisme tradisional atau lama, dan institusionalisme baru. Perbedaan antara keduanya adalah jika institusionalisme lama mengupas lembaga-lembaga kenegaraan (aparatur negara) seperti apa adanya secara statis. Sedangkan institusionalisme baru melihat institusi negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah tujuan tertentu yang perlu ada rencana atau design yang secara praktis menentukan langkah-langkah untuk tercapainya tujuan tertentu. Perhatian Institusionalisme baru lebih tertuju pada analisis ekonomi, kebijakan fiskal moneter, pasar dan globalisasi ketimbang masalah konstitusi yuridis.

Institusionalisme dipicu oleh pendekatan behavioralis yang melihat politik dan kebijakan public sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu. Bentuk dan sifat dari institusi



ditentukan oleh para aktor serta pilihannya. Dengan demikian, kedudukan sentral dari institusi-institusi dalam membentuk kebijakan public di nomor duakan.<sup>2</sup>

Institusional dikenal karena dua hal : pertama karena pendekatannya yang holistik dalam memahami situasi ataupun masalah kemasyarakatan. Kedua serangan terhadap pandangan mainstream ekonomi neoklasik atau kapitalisme pasar bebas. Mengapa para penyerang tidak serta menjadi institusionalis? Karena banyak orang yang meragukan keilmiahannya pendekatan holistik ataupun keilmiahannya hasil riset. Dengan kata lain metodologi riset yang diterapkan aliran institusionalis menyebabkan orang tidak tertarik masuk ke aliran tersebut.

*Dalam Institusionalisme ada variasi metode riset :*

1. Comparative analysis (disebut juga dengan historical comparative method) yaitu peneliti melakukan analisis sosiologis dalam bentuk perbandingan proses sosial antara dua institusi, Ada dua pendekatan comparative analysis yaitu: 1) dengan mencari persamaan-persamaan yang ada, dan 2) dengan mencari perbedaan-perbedaan yang ada.
2. Studi kasus dengan pendekatan etnografis, yaitu peneliti memilih sebuah institusi sebagai kasus yang akan diamati dengan mencermati aspek sosio kultural yang ada.
3. Metode riset kuantitatif, yaitu pada umumnya bertitik tolak pada positivisme yang cenderung meneliti hanya sebagian fenomena, pendekatan ini ditandai dengan pengembangan teori dan hipotesa, modeling dan penggunaan data kuantitatif serta alat statistik.

Dengan ini peneliti menggunakan variasi model riset pelembagaan tentang studi kasus karena dianggap peneliti tepat untuk menganalisis bagaimana jalannya program rekrutmen yang ada di DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri dengan cara pendekatan sosialnya dengan masyarakat serta kegiatan-kegiatan apa yang bisa mempengaruhi masyarakat kabupaten

<sup>2</sup> Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), hal. 96.



kediri agar mau menjadi bagian dari anggota partai perindo di kabupaten kediri, karena partai perindo adalah partai baru yang ada di kabupaten kediri serta partai yang masih ingin terus menambah anggotanya untuk memenangkan pemilu yang akan datang.

### 2.1.2 Pelembagaan Partai Politik

Dalam teori Kelembagaan dikatakan bahwa partai politik ada karena dibentuk oleh kalangan legislatif dan eksekutif, karena kedua anggota lembaga tersebut ingin mengadakan suatu sosialisasi dengan masyarakat sehubungan dengan pengangkatannya di dalam suatu ruang lingkup pemilihan umum, agar tercipta hubungan dan memperoleh dukungan dari masyarakat maka terbentuklah partai politik. Karena partai politik bentukan pemerintah dianggap tidak dapat menampung lagi aspirasi masyarakat, maka pemimpin kecil masyarakat berusaha membentuk partai-partai lain.<sup>3</sup>

Pelembagaan partai politik adalah proses pematapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya (*the process by which the party becomes established in terms of both of integrated patterns of behavior and of attitude or culture*).<sup>4</sup> Membuat lembaga politik menjadi efektif bukan karena hanya meliputi penguatan dari kapasitas dan sumber daya tetapi juga karena rancangannya agar tepat dengan situasi. Hal ini merupakan sebuah persoalan yang sangat kompleks dan kontroversional berkenaan dengan aturan-aturan elektoral dan konstitusional yang membentuk perwakilan dan pemerintahan.

Walaupun dominasi telah terkikis oleh pertumbuhan media masa dan organisasi masyarakat sipil, partai politik tetap merupakan sebuah kerangka kerja kelembagaan yang sangat penting bagi perwakilan dan pemerintahan dalam sebuah demokrasi. Partai-partai politik masih tetap menjadi lembaga menengah yang paling penting antara warga negara dan

<sup>3</sup> Surbukti Ramlan, Op.Cit 113-114

<sup>4</sup> Ramses M, Andy et al, 2009. *Politik Dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia hlm. 137



negara. Partai politik juga dapat menempa beragam identitas, kepentingan, pilihan dan hasrat menjadi undang-undang, bantuan, kebijakan dan koalisi. Tanpa adanya partai-partai yang efektif yang setidaknya memiliki basis dukungan yang agak stabil, negara demokrasi tidak akan memiliki pemerintahan yang efektif.

Bagaimanapun partai politik mempunyai status dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik merupakan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara, bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi (*political parties created democracy*). Karena itu partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat pelembagaannya dalam setiap sistem politik yang demokratis.

Namun banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik, yang paling serius diantaranya menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih dari sebuah kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau dengan bahasa lain berniat untuk memuaskan “nafsu birahi” kekuasaan sendiri. Partai politik hanyalah sebagai fungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan telah beruntung berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu dengan mengorbankan kepentingan umum. Proses pelembagaan demokrasi pada pokoknya sangat ditentukan oleh pelembagaan organisasi politik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri. Yves Meny and Andrew Knaap menyatakan : Suatu sistem politik dengan hanya satu partai politik, sulit sekali dibayangkan untuk disebut demokratis, apalagi jika tanpa partai politik sama sekali.

Tingkat atau derajat pelembagaan partai politik itu sendiri dalam sistem demokrasi menurut Yves Meny dan Andrew Knapp tergantung kepada tiga parameter, yaitu:<sup>5</sup>

#### I. Usia (*its age*)

<sup>5</sup> Asshidiqie, Jimly, 2006. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta



## 2. *The depersonalization of the organization*

### 3. *Organizational differentiation*

Setiap organisasi yang normal, tumbuh dan berkembang secara alamiah menurut tahapan waktunya sendiri. Karena itu, makin tua usianya, ide-ide dan nilai-nilai yang dianut di dalam organisasi tersebut semakin terlembagakan (*institutionalized*) dan menjadi tradisi dalam organisasi. Organisasi yang berkembang semakin melembaga cenderung pula mengalami proses “depersonalisasi”. Orang dalam maupun orang luar sama-sama menyadari dan memperlakukan organisasi yang bersangkutan sebagai sebuah institusi, dan tidak mencampur-adukkannya dengan persoalan personal atau pribadi para individu yang kebetulan menjadi pengurusnya.

Banyak organisasi meskipun usianya sudah sangat tua, tetapi tidak terbangun tradisi dimana urusan-urusan pribadi pengurusnya sama sekali terpisah dan dipisahkan dari urusan keorganisasian. Dalam posisi demikian, berarti derajat pelembagaan organisasi tersebut sebagai institusi, masih belum kuat, atau lebih tegasnya belum terlembagakan sebagai organisasi yang kuat.

Dalam penelitian skripsi ini selaku peneliti mengadopsi teori kelembagaan partai politik milik Mathias Basedau dan Alexander Stroh. Menurut Basedau dan Stroh, terdapat empat aspek kelembagaan partai politik.<sup>6</sup> Pertama menjelaskan akar partai di masyarakat, yaitu hubungan dengan organisasi masyarakat sipil. Hubungan dengan masyarakat sipil dipahami sebagai sebuah ikatan yang dapat memberikan kontribusi bagi partai politik, artinya indikator ini mengandalkan bahwa kelembagaan suatu partai politik mampu menjalin hubungan atau bahkan kerja sama, mampu membina, dan berkomunikasi secara aktif dengan organisasi masyarakat sipil seperti organisasi keagamaan, kelompok dagang, kelompok tani atau

<sup>6</sup> Mathias Basedau dan Alexander Stroh, *Measuring Party In Developing Countries*, Hamburg: GIGA German Institute Of Global And Area Studies, 2008, Hal. 8



lembaga swadaya masyarakat tentu merupakan indikator yang baik dari akar dalam masyarakat.

Kedua yaitu merupakan otonomi. Indikatornya meliputi tentang keputusan dari individu dan kelompok. Indikaor ini mengandaikan terlembagaanya partai politik dapat terlihat dari bagaimana di setiap pengambilan keputusan suatu partai politik baik program dan hal-hal yang bersifat pribadi partai dilakukan secara independen dari kepentingan individual ataupun kelompok-kelompok tertentu baik yang ada di dalam partai politik maupun kelompok di luar partai. Keputusan yang dihasilkan merupakan hasil dari kesepakatan bersama antara pimpinan dengan kader pengurus lainnya.

Ketiga, keorganisasian partai politik. Indikatornya yaitu kekuatan anggota, berfungsi untuk mengukur kekuatan dari keanggotaan kader suatu partai politik. Partai politik yang terlembaga menghendaki adanya kuantitas dan kualitas dari kader atau anggota partai. Partai mampu menampung dan menyeleksi kandidat kader yang datang dari masyarakat eksternal partai dan menyeleksinya sesuai dengan aturan yang ada di dalam partai tersebut. Dengan adanya proses seleksi tersebut maka diyakini kader yang terpilih adalah orang-orang yang memiliki dedikasi yang tinggi dan loyalitas terhadap partai politik, dan pengabdian kepada partai dalam masyarakat umum.

Keempat, koherensi. Indilkatornya, yaitu koherensi kelompok parlemen (tidak meninggalkan partai atau lompat pintu). Indikator ini mengandaikan pada keterlembagannya suatu partai politik jika kader yang terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat baik di pusat maupun di daerah tidak melakukan tindakan yang merugikan partai. Tindakan tersebut adalah melakuan tidakan-tindakan diluar dari kesepakatan partai yang disetujui dalam parlemen, kader partai melakukan tindakan pembelotan dengan meninggalkan partai dan berpindah ke partai lain dengan melakukan sejumlah alasan tertentu. Indikator ini mnghendaki adanya koherensi dari masing-masing kader yang terpilih di lembaga legislatif. Kader partai



memahami mekanisme yang berlaku dan ditetapkan oleh aturan partai, baik dalam AD/ART partai ataupun aturan turunan lainnya.

Konsekuensi dari mekanisme kepemimpinan hanya melalui partai-partai politik, mengidealkan partai politik sebagai lembaga yang fungsi dan perannya optimal.<sup>7</sup> Pelembagan partai politik masih belum berjalan dengan baik dan masih ada celah kelemahannya, seperti menghadapi persoalan kesetiaan para kadernya.

Ketika memasuki era reformasi seperti saat ini, partai politik seakan-akan kaget dengan tuntutan masyarakat yang besar namun tidak disertai dengan kelembagaan yang baik. Partai politik saat ini belum menunjukkan akuntabilitasnya kepada konstituen (pemilih). Ada tiga persoalan yang berkaitan dengan kelembagaan partai politik, yaitu:<sup>8</sup>

#### 1. Ideologi dan Platform

Setiap partai politik dibentuk berdasarkan diri pada ideologi yang hendak diusungnya. Ideologi ini yang kemudian menjadi identitas partai. Untuk membedakan antara partai yang satu dengan partai yang lain dapat dilihat dari ideologi yang dianut oleh partai yang bersangkutan. Keberadaan ideologi dalam sebuah partai juga menjadi pedoman nilai dalam melakukan program dan aktifitas kerja politik dalam hal yang terpenting. Dia mampu menjadi pegangan setiap kadernya dan pengurus partai dalam mengejawantahkan ideologi tersebut menjadi program, kegiatan atau aktifitas partai di dalam kehidupan masyarakat sehari-harinya.

Dalam konteks ideologi, para politikus partai cenderung bersifat mendua atau tidak konsisten.<sup>9</sup> Di satu pihak secara formal dan verbal mereka mendukung ideologi,

<sup>7</sup> Alfan Alfian, "Partai Politik Dan Kepemimpinan Nasional", Jurnal Sekretariat Negara RI, No. 25, Maret 2013, hal.177

<sup>8</sup> Lili Romli, "Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia". Jurnal Politica, Vol.2, No.2,(November2011),hal.202

<sup>9</sup> Syamsudin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hal 51



baik ideologi negara maupun ideologi partai, tetapi dalam perilaku sering menggunakan dukungan itu untuk kepentingan kekuasaan belaka. Sementara dalam konteks taktik dan strategi, pada umumnya partai-partai terperangkap upaya memperjuangkan jabatan-jabatan publik ketimbang perjuangan memenangkan kebijakan publik.

Dalam konteks kebijakan publik, ideologi juga berperan dalam menentukan posisi apa yang harus ditentukan oleh partai untuk mendorong atau bahkan menolak suatu kebijakan. Sedangkan dalam konteks hubungan dengan pemilih, ideologinya juga dapat menjadi daya tarik bagi pemilih untuk menentukan partai mana yang sesuai dengan cara pandang yang mereka yakini.

Cara untuk menerjemahkan ideologi yang dimiliki oleh suatu partai politik kedalam hal-hal yang riil dan kongkret dirumuskan dalam bentuk platform partai politik. Platform partai politik berisikan panduan umum dan garis besar arah kebijakan partai dalam kontribusinya terhadap permasalahan bangsa dan negara. Platform partai memuat hal-hal penting dan mendasar yang digunakan sebagai acuan dasar bagi penyusunan hal-hal yang dilakukan, seperti program kerja dan isu politik.

Platform partai politik dipandang penting untuk dua sasaran.<sup>10</sup> Pertama, sebagai instrumen komunikasi kepada masa konstituen tentang apa yang diperjuangkan partai.

Selain mencerminkan identitas partai, platform juga menjadi panduan arah partai ketika mempunyai akses terhadap kekuasaan. Dalam konteks ini, platform dapat dilihat sebagai proposal yang ditawarkan partai kepada konstituen dan masyarakat pemilih.

Kedua, platform adalah dimana cara pandang partai tentang bagaimana seharusnya kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai bidang dikelola. Platform adalah turunan dari ideologi partai, yang memuat nilai, harapan.

<sup>10</sup> Lili Romli, *Op.Cit.*, hal 205



## 2. Kohesivitas dan Manajemen Konflik

Konflik merupakan suatu yang intern dalam setiap masyarakat atau suatu organisasi. Konflik yang terjadi dalam masyarakat bisa dalam bentuk kekerasan maupun dalam bentuk non-kekerasan. Konflik dalam bentuk kekerasan adalah dimana terjadinya konflik yang saling melukai atau bahkan menghancurkan satu sama lain dari pihak-pihak yang telah terlibat dalam sebuah konflik. Sedangkan konflik non-kekerasan adalah dimana konflik terjadi karena perbedaan pendapat atau sebuah gagasan

Pada umumnya konflik di dalam tubuh partai politik tidak jauh berbeda antara partai satu dengan partai lainnya. Beberapa konflik yang pernah mencuat di media massa diantaranya adalah konflik antar fraksi, konflik pada kongres partai, konflik personal antar pengurus dan konflik antar tingkat pengurusan, ataupun konflik antar pengurus pada tingkatan yang sama atau antap sayap partai.<sup>11</sup>

Bila dalam partai politik terjadi konflik maka pengelolanya tidak melibatkan pengadilan. Kader politik harus mengelola konflik internalnya dan penyelesaiannya melalui mekanisme rumah tangga internal partai politik. Konflik internal partai politik dalam penyelesaiannya agar tidak melibatkan pengadilan, ini penting dilakukan dalam rangka untuk memberikan pendidikan politik partai agar bisa mewujudkan tradisi mengelola konflik internalnya secara elegan dan dewasa. Partai politik “dipaksa” untuk mengatasi konflik internalnya sebagai jalan untuk mendewasakan cara berdemokrasi. Saatnya kader-kader partai politik menghormati mekanisme

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal.207



internalnya partai politik. Juga untuk mendidik kader partai politik untuk menghormati aturan rumah tangganya sendiri.

Kegagalan organisasi dan institusional dialami oleh hampir semua partai politik.

Ada empat keompok kegagalan partai-partai politik, yaitu kegagalan organisasi dan institusi, kegagalan kepemimpinan, kegagalan ideologi, serta kegagalan taktik dan strategi. Konflik internal yang dialami oleh partai-partai besar maupun kecil pada umumnya bersumber pada pelanggaran “aturan main” yang sebagian besar dilakukan oleh pemimpin atau ketua umum partai masing-masing.<sup>12</sup>

### 3. Rekrutmen dan Kaderisasi

Dalam setiap organisasi, anggota merupakan sumber dukungan utama. Dalam organisasi politik, peran anggota sangat signifikan karena melalui para anggota ini akan berperang sebagai juru bicara untuk menyuarakan dan menyebarluaskan platform dan program partai kepada masyarakat. Untuk mengisi keanggotaan tersebut, partai politik melakukan rekrutmen anggota. Partai politik yang baik tentu memiliki sistem rekrutmen yang baik. Sistem rekrutmen mencakup pola seleksi, penjenjangan, dan pendidikan bagi para anggotanya. Dengan demikian tidak akan sembarangan orang secara otomatis untuk dapat memperoleh keanggotaan tanpa melalui seleksi terlebih dahulu.

Selain rekrutmen anggota, partai politik yang melembaga dengan baik akan melakukan kaderisasi dan pendidikan politik bagi anggota-anggotanya secara terus menerus. Tujuan dari kaderisasi dan pendidikan politik itu sendiri tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas para anggota-anggotanya sehingga nanti mereka mampu

<sup>12</sup> Syamsudin Haris, *Op. Cit.*, hal.50



menghadapi persoalan dan tantangan yang selalu berkembang dalam kehidupan politik, bangsa, dan negara.<sup>13</sup>

Persoalan yang muncul pada partai-partai politik pada saat ini adalah kurangnya melembaga proses rekrutmen anggota. Pola seleksi, perjenjangan, dan pendidikan bagi para calon anggotanya kurang dilakukan secara memadai. Fenomena munculnya “kader Instan” terjadi karena ketidak siapan partai politik dalam menunjukkan bahwa partai politik belum melakukan pola rekrutmen secara sistematis. Fenomena kader partai “loncat Pagar” dari partai satu ke partai yang lain menunjukkan bahwa proses kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik belum berhasil untuk menanamkan loyalitas yang kuat, bisa jadi sistem nilai dan norma suatu partai belum tentu berhasil menyatu di dalam diri para kader dan akhirnya kader-kader dengan mudah untuk melakukan “Loncat Pagar” ke partai politik lainnya.

## 2.2 Tinjauan Konseptual

Dalam bagian ini, akan dijelaskan mengenai tinjauan konseptual yang digunakan untuk penelitian skripsi. Tinjauan konseptualnya menggunakan rekrutmen dan partai politik.

### 2.2.1 Rekrutmen

Rekrutmen politik secara umum diartikan sebagai suatu proses dimana lembaga menempatkan aktor-aktor pada suatu posisi tertentu, mengambil tempat sehingga terlibat dalam lembaga tersebut. Proses melalui suatu lembaga organisasi mengangkat orang berbakat yang dianggap mampu menduduki suatu posisi atau jabatan yang ada, sehingga yang bersangkutan dapat berpartisipasi secara langsung dalam setiap kegiatan organisasi yang berorientasi kepada kualitas dan kuantitas anggota serta menghidupkan regenerasi untuk eksistensi organisasi. Jadi, apabila kata rekrutmen menambahkan kata politik dibelakangnya, maka akan merujuk pada suatu proses dimana partai politik mengangkat aktor dan

<sup>13</sup> Michael Rush dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hal.183



menempatkan pada posisi atau jabatan tertentu, baik pada infrastruktur maupun pada suprastruktur politik, sehingga yang bersangkutan terlibat dalam proses kehidupan politik.

Miriam Budiardjo, mendefinisikan rekrutmen politik sebagai proses melalui mana partai politik mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.<sup>14</sup> Dari definisi yang diungkapkan tersebut dapat tergambar lebih menekankan proses rekrutmen politik ditempuh sebagai upaya mencari anggota baru dengan maksud menjaga kelangsungan hidup partai. Proses rekrutmen dalam model ini memang akan kelihatan lebih terletak pada faktor kuantitatifnya, dengan merekrut sebanyak-banyaknya orang atau kelompok untuk menjadi anggota partai. Penyeleksian anggota baru ini berkaitan dengan upaya untuk mempertahankan proses-proses dalam partai politik dan kelangsungan kegiatan dalam partai politik tersebut. Proses rekrutmen politik ini juga bertujuan untuk menyiapkan calon-calon pemimpin masa mendatang. Mereka diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan partai politik tersebut.

Pendapat lainnya tentang rekrutmen politik dikemukakan Ramlan Surbakti dalam buku Memahami Ilmu Politik yang dimaksud rekrutmen politik adalah: “Seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan menghususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol, partai politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang calon pemimpin”<sup>15</sup>

Rush & Althof menyatakan rekrutmen atau perekrutan adalah proses dua arah, dikarenakan individu-individunya mungkin mampu mendapatkan kesempatan, atau mungkin di dekati oleh orang lain kemudian menjadi pejabat pada posisi tertentu. Dengan cara yang sama, perekrutan itu bisa disebut formal jika para individu direkrut dengan terbuka melalui cara prosedural atau institusional berupa seleksi atau pemilihan. Rekrutmen disebut informal

<sup>14</sup> Budiardjo, Miriam, 1981. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm.164

<sup>15</sup> Surbakti, Ramlan, *Op.cit.* hlm.118



jika para individunya di rekrut secara private atau dibawah tangan tanpa melalui atau sedikit sekali melalui cara institusional.<sup>16</sup> kemudian oleh Suharno rekrutmen politik ini lebih di persempit dalam konteks partai politik. Suharno menyatakan rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik.<sup>17</sup>

Lily Romli mengemukakan bahwa dalam hal rekrutmen politik ada dua mekanisme yang bisa dijalankan oleh partai politik, yaitu rekrutmen yang terbuka dan tertutup.<sup>18</sup>

1. Model rekrutmen terbuka, artinya semua warga Negara yang memenuhi syarat tertentu (seperti kemampuan kecakapan, umur, keadaan fisik) mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam pemerintah. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya cukup tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan berhasilkeluar sebagai jawara. Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya tentang keadaan masyarakat serta nilai moral yang melekat dalam dirinya termasuk integritasnya, model rekrutmen ini juga memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menilai kemampuan elite politiknya. Biasanya model rekrutmen ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang kredibilitas dan mempunyai integritas tinggi.
2. Model rekrutmen tertutup, kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas ser integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil elite itu sendiri serta berdasarkan kedekatan, kedekatan itu bisa berupa Hubungan Darah, Golongan, etnis dan lainnya.

Rekrutmen Politik sangat ditentukan oleh berbagai proses yang ada di dalamnya, seperti mekanisme ataupun kriteria-kriteria yang akan digunakan dalam pelaksanaan rekrutmen

<sup>16</sup> Michael Rush, Phillip Althoff, *Op. Cit.*, hlm.240

<sup>17</sup> Inu Kencana, Syafie. 2009. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung : Pustaka Reka Cipta, hlm. 58

<sup>18</sup> Lili Romli, 2005. *Pilkada Langsung, Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal*, Jakarta: Jurnal Analisis CSIS 34, No.3, hal 19



tersebut. Dalam proses pemilihannya pun ada berbagai macam yang dilakukan, seperti teknis seleksi, undian atau lainnya, dilaksanakan oleh partai politik yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dimana proses rekrutmen politik dilaksanakan. Pada hakekatnya hasil rekrutmen politik menentukan mekanisme politik dalam suatu sistem politik, baik itu dalam skala nasional maupun lokal/ daerah. Konsep ini menunjukkan bahwa rekrutmen politik sangat menentukan arah dari kebijaksanaan politik suatu partai politik. Dalam seleksi penentuan kebijaksanaan elit politik, orang-orang yang direkrut untuk menduduki posisi yang lebih tinggi/kedudukan tingkat atas. Masalah pemilihan individu-individu untuk mengisi jabatan penentu keputusan tingkat atas adalah merupakan hal yang urgen karena di dalamnya menyangkut proses mempertahankan posisi dalam struktur.

Terdapat tiga tahap dalam rekrutmen politik, yaitu sertifikasi penominasian, dan tahap pemilu.<sup>19</sup> Tahap sertifikasi adalah tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi. Berbagai hal yang mempengaruhi tahap sertifikasi meliputi aturan-aturan partai dan norma-norma sosial maupun informal. Tahap penominasian meliputi ketersediaan calon yang memenuhi syarat dan permintaan dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang dinominasikan. Sementara itu, tahap pemilu adalah tahap terakhir yang menentukan siapa yang memenangkan pemilu.

Perlakuan politik terhadap keseluruhan tahap-tahap Rekrutmen politik sangat berhubungan dengan bagaimana partai politik mengorganisasikan diri. Terdapat empat hal penting dalam Rekrutmen politik yaitu,<sup>20</sup> Siapa kandidat yang dapat dinominasikan? Siapa yang menyeleksi? Dimana kandidat di seleksi? Bagaimana kandidat dipilih?

Dari uraian di atas, terkait siapa kandidat yang dinominasikan dalam rekrutmen politik dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat inklusifitas atau eksklusifitas. Dalam model inklusif, setiap pemilih dapat menjadi kandidat partai. Sementara itu, pada model eksklusif

<sup>19</sup> Norris Pippa . 2006 . *Political Recruitmen* . Cambridge : Cambridge UP, p.89.

<sup>20</sup> Hazan Reuven. 2001. *Candidate Selection Methods*. London : Sage Publication, hal 297-322



terdapat sejumlah kondisi yang membatasi hak pemilih untuk ikut serta dalam seleksi kandidat. Dalam rekrutmen politik, penyeleksi adalah lembaga yang menyeleksi kandidat.

Yang disebut lembaga ini dapat berupa satu orang, beberapa atau banyak orang, sampai pada pemilih. Pada titik ekstrim, penyeleksi adalah sangat inklusif, yaitu pemilih yang memiliki hak memilih dalam pemilu. Dalam kondisi ekstrim, selektor sangat eksklusif dimana kandidasi ditentukan oleh pimpinan partai.<sup>21</sup>

Sementara itu, dalam menjawab persoalan ketiga, yaitu dimana kandidat diseleksi. Secara ringkas dapat dikatakan kandidat di seleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya, seperti representasi teritorial atau fungsional, metode ini disebut sentralistik. Berlawanan dengan metode sentralisasi adalah metode desentralisasi. Pada metode desentralisasi, kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai. Dalam hal menjelaskan tentang bagaimana kandidat dinominasikan, ada dua model yaitu model pemilihan dan penunjukan. Dalam sistem pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem pemilihan yang murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi. Sementara itu, dalam sistem penunjukan, penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan. Dalam sistem penunjukan murni, kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan oleh agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai.<sup>22</sup>

Kriteria rekrutmen politik pemimpin, syarat/ kriteria untuk memilih dan menetapkan calon legislatif oleh Richard.S Katz dan William Crotty, antara lain yaitu :<sup>23</sup>

a. Usia, dimana seorang calon haruslah memiliki usia yang cukup yakni 21 tahun untuk dapat dicalonkan menjadi anggota legislatif. Usia adalah hal yang penting karena dapat

<sup>21</sup> Pamungkas, *Op.Cit.*, hal. 93

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 94

<sup>23</sup> Richard.S Katz dan William Crotty, *Handbook of Party Politice*, London: Sagen Publications. Hal: 89-91



menentukan tingkat analisa seseorang dalam menghadapi masalah. Biasanya faktor usia juga dapat mengukur kematangan dan pengalaman seseorang dalam masyarakat.

- b. Popularitas, yakni seorang calon adalah orang yang dikenal masyarakat luas dan memiliki reputasi yang baik.
- c. Pendidikan, yaitu seorang calon anggota legislatif harus mempunyai tingkat pendidikan yang bagus minimal sarjana agar calon tersebut dapat memahami dan mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
- d. Keuangan dan finansial, hal ini adalah suatu syarat yang juga dianggap penting, seorang calon anggota legislatif haruslah mempunyai dana yang cukup besar yang digunakan ketika mengadakan kampanye.
- e. Akseptabilitas, yakni penerimaan masyarakat terhadap seorang calon anggota legislatif. Penerimaan ini akan muncul ketika masyarakat merasa calon tersebut adalah orang-orang yang benar-benar dapat menyuarakan kepentingannya.
- f. Kapabilitas, yakni kemampuan untuk menyerap aspirasi masyarakat, kemudian merumuskan aspirasi tersebut terhadap bentuk pernyataan yang jelas dan menyampaikan hasil rumusan itu kepada masyarakat.

### 2.2.2 Partai Politik

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka mampu untuk menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar di dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.<sup>24</sup> Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik

<sup>24</sup> Miriam Budiarjo, *Op.Cit.*, hal.403.



dengan cara konstitusional untuk melakukan programnya. Ada empat karakteristik yang biasanya dipakai untuk membedakan partai politik dengan kelompok-kelompok lainnya, seperti kelompok kepentingan, kelompok penekan dan faksi, yaitu :<sup>25</sup>

1. Partai politik umumnya didirikan untuk dapat mengelola kekuasaan pemerintahan untuk dapat memperoleh jabatan politik. Walaupun ada juga partai politik yang ketika didirikan ditujukan lebih untuk menyebarkan platform dan ideologi partai politik itu ketimbang mengejar jabatan politik
2. Partai politik, terutama yang ideal, memiliki keanggotaan yang kuat dan administrasi keanggotaan yang rapi. Bahkan, keanggotaan itu juga terlihat dalam bentuk adanya kartu anggota partai politik.
3. Partai politik berurusan lebih dengan isu-isu yang luas cakupannya dari pada fokus pada sebuah isu tunggal seperti yang biasanya diurus oleh kelompok kepentingan atau kelompok penekan.
4. Dalam tingkat yang beranekaragam, partai politik disatukan oleh pilihan politik yang disebarluaskan dan identitas ideologis.

Klasifikasi dan sistem kepartaian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu partai kader dan partai massa.<sup>26</sup> Partai massa mengutamakan kekuatan pada jumlah anggota yang terdiri atas berbagai aliran politik dan kelompok, sedangkan partai kader lebih menekankan pada kekuatan organisasinya dan disiplin dari anggota – anggotanya.

Bagi Huntington dalam Lilli Romli, sebuah sistem kepartaian yang kokoh harus memiliki sekurang-kurangnya dua kapasitas.<sup>27</sup> *Pertama*, melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai, sehingga dapat mengalihkan kepada bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan.

*Kedua*, mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi,

<sup>25</sup> Ikhsan Darmawan, *Mengenal Ilmu Politik*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2015, hal.128.

<sup>26</sup> Muslim Mufti, *Op.Cit.*, hal. 249.

<sup>27</sup> Lilli Romli, *Op.Cit.*, hal. 201.



yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan kuat yang dihadapi oleh sistem politik.

Dengan demikian, sistem politik masih mengalami masalah yang serius dari sisi kelembagaan maupun pelaksanaan demokrasi internalnya.

Sementara untuk sistem multipartai, dari segi jumlah tipe-tipe sistem multipartai secara teoritis tidak terbatas. Bila dua buah koalisi besar yang permanen terbentuk menawarkan pada para pemilih suatu program legislatif yang sama dan bertindak dengan suara yang sama di parlemen, maka akan sangat menyerupai sistem dua partai. Dibalik penampilan luar sistem multipartai sebenarnya terdapat sejenis sistem dua partai yang sudah tertanam dengan kuat. Semuanya tergantung pada solidaritas pendukung-pendukungnya dan disiplin dalam partai – partai yang berkoalisi.

Sistem multi partai dianggap lebih efektif dalam merepresentasikan keinginan rakyat yang beraneka ragam ras, budaya, agama. Sistem inilah yang digunakan di Indonesia, karena dalam pemerintahan parlementer cenderung menitik beratkan pada kekuasaan badan legeslatif, sebab tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk menduduki pemerintahan sehingga mengharuskan untuk berkoalisi. Pengambilan keputusan ini lebih rumit karena harus bermusyawarah dengan partai – partai koalisi.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian mengenai Pelembagaan dan Kaderisasi politik DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri, penelitian lain yang pernah dilakukan antara lain adalah :

Tobing, Andhika meneliti tentang Kaderisasi dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi: DPD Partai Demokrat Propinsi Sumatera Utara Dalam Penetapan Caleg Pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara). Hasil penelitian ini menunjukkan Partai Demokrat Sumatera Utara menggunakan sistem rekrutmen terbuka yaitu menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian calon anggota legislatif, sedangkan sistem kaderisasi dilakukan Partai Demokrat Sumatera Utara



adalah dengan berperan sebagai agen untuk menyediakan dan mempersiapkan calon-calon politisi dengan melakukan pendidikan dan pelatihan untuk dipersiapkan duduk di kursi parlemen, atau jabatan strategis lainnya menjadi pemimpin di masa mendatang. Partai Demokrat dalam memilih dan menentukan calon anggota legislatif untuk mengikuti pemilu 2009 adalah faktor ketokohan yang memiliki basis massa besar untuk meraih dukungan suara yang banyak dengan harapan mempunyai kesempatan lebih besar untuk meraih dukungan suara yang banyak dari masyarakat.

Rizki Koiruly pada tahun 2013 dengan judul Sistem Rekrutmen dan Kaderisasi PDIP Kabupaten Kendal era reformasi (studi kasus oligarki di kabupaten kendal). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Penelitian tersebut membahas mengenai PDI Perjuangan Kabupaten Kendal yang memiliki kecenderungan oligarki di tingkat lokal, karena terdapat dominasi kepemimpinan keluarga Hendy Boedoro yaitu Widya kandi yang merupakan istri dari Hendy Boedoro juga mengambil peran dalam kepemimpinan partai. Dengan adanya elit politik ini menjadikan ketergantungan partai terhadap tokoh-tokoh tertentu. Pada akhirnya partai politik gagal melaksanakan fungsinya dalam hal rekrutmen dan kaderisasi politik yang baik dengan cara terbuka untuk mewujudkan ideologi dan platform partai karena hanya terpusat pada perebutan kekuasaan politik semata.<sup>28</sup>

Roni Tamara pada tahun 2014 dengan judul sistem kaderisasi dan penetapan calon legislatif dalam pemilu 2009 (studi kasus partai golkar kabupaten penajam paser utara). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian tersebut membahas tentang sistem kaderisasi yang dilakukan partai golkar di kabupaten penajam paser utara periode 2004-2009 menggunakan sistem usulan dari bawah (bottom up) dengan metode yang digunakan adalah diskusi dan penyajian materi.

<sup>28</sup> Rizki khoiruly, 2013. Sistem Rekrutmen dan kaderisasi PDI Perjuangan di Kabupaten kendal : Skripsi tidak (dipublikasikan) Universitas Diponegoro.



Sementara proses penetapan calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai golkar di kabupaten penajam paser utara pada pemilu 2009 dengan menggunakan sistem tertutup.

Walaupun di dalam prosesnya partai golkar menggunakan sistem tertutup dalam menentukan calonnya, partai golkar sebenarnya juga memakai sistem terbuka tetapi hanya dalam proses pendaftaran.<sup>29</sup>

**Tabel 2.3**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

| No. | Peneliti               | Judul  | Hasil Penelitian   |
|-----|------------------------|--|--|
| 1.  | Tobing, Andhika (2009) | Kaderisasi dan Penetapan Caleg Partai Politik (studi : DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Dalam Penetapan Caleg Pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara) | Hasil penelitian ini menunjukkan Partai Demokrat Sumatera Utara menggunakan sistem rekrutmen terbuka, sedangkan sistem kaderisasi dilakukan Partai Demokrat Sumatera Utara adalah dengan berperan sebagai agen untuk menyediakan dan mempersiapkan calon-calon politisi dengan melakukan pendidikan dan pelatihan untuk dipersiapkan duduk di kursi parlemen, atau jabatan strategis lainnya menjadi pemimpin di masa mendatang. |

<sup>29</sup> Roni tamara, 2014. *Sistem kaderisasi dan Penetapan calon anggota legislatif dalam pemilu 2009 (studi kasus partai golkar kabupaten penajam paser utara)*. Jurnal ilmu pemerintahan. Vol 2. No .1 [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/02/RONI%20\(02-25-14-11-07-19\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/02/RONI%20(02-25-14-11-07-19).pdf), diakses pada 24 mei 2017 pukul 10.00.



|    |                       |  |  |
|----|-----------------------|--|--|
| 2. | Rizki Khoiruly (2013) | Sistem rekrutmen dan kaderisasi PDIP kabupaten kendal era reformasi (studi kasus oligarki di kabupaten kendal)               | Hasil dari penelitian ini menunjukkan pola rekrutmen dan kaderisasi PDIP Perjuangan di Kab. Kendal gagal melaksanakan fungsi partai dengan cara terbuka untuk mewujudkan ideologi dan platform karena terpusat pada perebutan kekuasaan semata.          |
| 3. | Roni Tamara (2014)    | Sistem kaderisasi dan penetapan calon legislatif dalam pemilu 2009 (studi kasus partai golkar kabupaten penajam paser utara) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kaderisasi dan penetapan calon legislatif dalam pemilu 2009 partai golkar di kabupaten penajam paser utara menggunakan sistem tertutup dalam menentukan calon, dan menggunakan sistem terbuka saat pendaftaran |

Sumber : Hasil Olahan Peneliti 2016

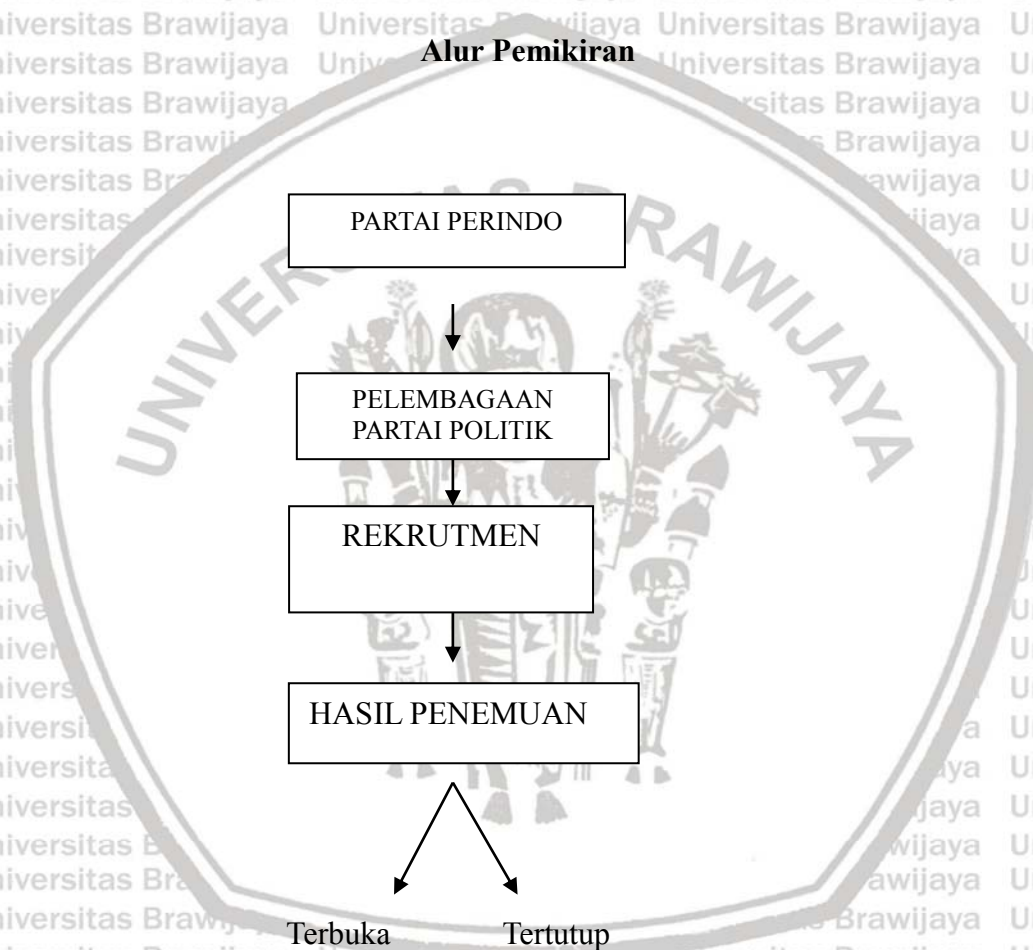
#### 2.4 Alur Pikir Penelitian

Alur pikir penelitian merupakan kerangka konsep penelitian yang berfungsi sebagai bahan instrument untuk menentukan arah kegiatan dalam penelitian. Sebagai mana tujuan penelitian yang telah di kemukakan pada Bab I maka metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif evaluatif di maksudkan untuk menganalisis



pelaksanaan pelembagaan dan kaderisasi dalam menetapkan calon anggota legislatif pada Partai Perindo Kabupaten Kediri dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pelembagaan dan rekrutmen dalam menetapkan calon legislatif pada Partai Perindo Kabupaten Kediri. Alur pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar. 2.4**  
**Alur Pemikiran**



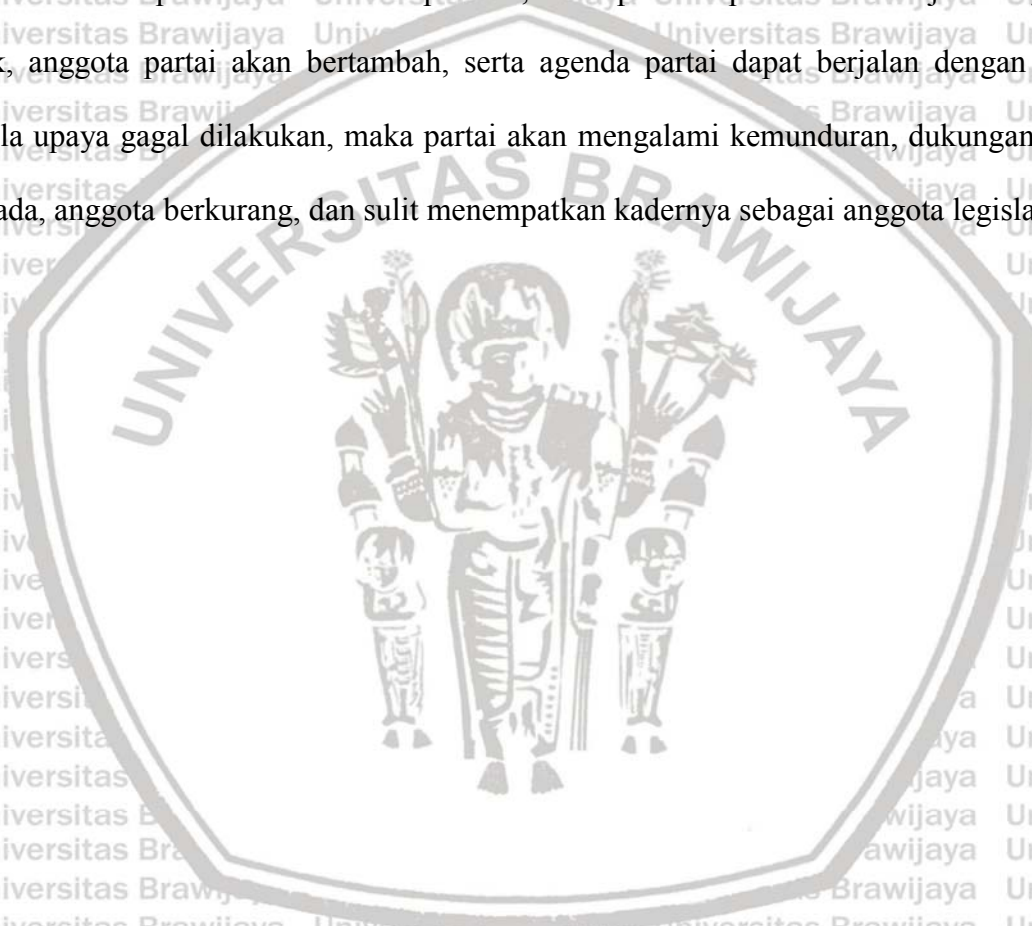
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kabupaten Kediri berperan sebagai pelaksana rekrutmen tingkat Kabupaten Kediri. Pelaksanaan didasarkan pada peraturan DPD Partai Perindo yang berkaitan dengan rekrutmen anggota partai. Partai Perindo merekrut anggota, kader dan pengurus partai untuk internal partai, yang kemudian dilakukan kaderisasi dan seleksi anggota untuk meningkatkan kualitas SDM partai yang nantinya akan dicalonkan dan diperjuangkan dalam pemilihan umum untuk menjadi anggota legislatif dan lain



sebagainya. Semakin banyak anggota partai yang dapat menduduki sebagai anggota legislatif menjadi indikator keberhasilan partai dalam pemerintahan. Pelaksanaan rekrutmen anggota tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat baik intern maupun ekstern partai.

Partai politik perlu melakukan upaya untuk mengantisipasi dan mengatasi hambatan yang ada. Apabila upaya yang dilakukan partai berhasil dan diperkuat dengan faktor pendukung pelaksanaan rekrutmen dan kaderisasi politik, maka partai akan mendapat dukungan dari rakyat untuk memperoleh suara dalam pemilu, kader partai dapat menduduki jabatan-jabatan politik, anggota partai akan bertambah, serta agenda partai dapat berjalan dengan lancar.

Apabila upaya gagal dilakukan, maka partai akan mengalami kemunduran, dukungan rakyat tidak ada, anggota berkurang, dan sulit menempatkan kadernya sebagai anggota legislatif.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan, penelitian kualitatif sebagai prosedur kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.<sup>1</sup> Menurut David Williams yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang-orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.<sup>2</sup> Pernyataan ini memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah dan dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai perhatian alamiah. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit.<sup>3</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

<sup>1</sup> Lexy J Moleong, 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Rosda. hlm 4

<sup>2</sup> Ibid, hlm 5

<sup>3</sup> Ibid, hlm 6



Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif evaluasi.<sup>4</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian evaluatif adalah penelitian dengan mengumpulkan data atau informasi untuk dibandingkan dengan kriteria tolok ukur, standar yang ideal, kemudian diambil kesimpulan.<sup>5</sup> Tujuan dari pendekatan deskriptif evaluatif dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pelebagaan dan kaderisasi dalam menetapkan calon anggota legislatif pada Partai Perindo Kabupaten Kediri dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan fungsi pelebagaan dan kaderisasi dalam menetapkan calon legislatif pada Partai Perindo Kabupaten Kediri.

### 3.2. Penetapan Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian di DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri, dengan pertimbangan bahwa di tingkat Kabupaten Kediri Partai Perindo merupakan Partai yang baru dan yang mungkin paling siap dan mempunyai misi untuk memperoleh suara untuk pemilihan legislatif pada 2019.

### 3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pedoman untuk melaksanakan kegiatan penelitian, terdapat dua maksud tertentu yang ingin dicapai peneliti dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus, yaitu :<sup>6</sup>

- Penetapan fokus dapat membatasi studi, sehingga dapat bermanfaat bagi jalannya penelitian. Penetapan fokus dapat berfungsi memenuhi kriteria masuk-keluar (*inclusion-*

<sup>4</sup> Suharsimi, Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* Ed.rev, cet 14. Jakarta: Rineka Cipta., hlm 35

<sup>5</sup> Ibid, hal 36

<sup>6</sup> Lexy J Moleong, *Op.Cit*, hlm. 5



*exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan, sehingga dapat memudahkan dalam pengambilan data serta pengolahan data hingga menjadi kesimpulan.

- b. Penelitian yang berjudul “Proses Rekrutmen Calon Anggota Partai Pada DPD Partai Perindo di Kabupaten Kediri” ini berfokus untuk melihat bagaimanakah pelaksanaan pelembagaan dan rekrutmen dalam menetapkan calon anggota legislatif pada Partai Perindo di Kabupaten Kediri dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan fungsi pelembagaan dalam rekrutmen untuk menetapkan calon legislatif pada Partai Perindo Kabupaten Kediri.

#### 3.4. Pemilihan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling atau sampling bertujuan. Sampling bertujuan adalah suatu “strategi jika seseorang menginginkan agar dapat memahami sesuatu mengenai kasus-kasus terpilih tertentu tanpa membutuhkan (atau berhasrat) untuk menggeneralisasi kepada semua kasus seperti itu”<sup>7</sup>

Purposive dilakukan dengan sengaja mengambil :

1. Informan kunci (key informant). Yang di maksud informan kunci disini adalah mereka yang tahu dan memiliki informasi pokok tentang partai Perindo di kabupaten kediri yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu Bapak Heri Purnawirawan selaku ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Peneliti memilih sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri Bapak Moch.Asrofi serta bendahara DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri yaitu Bapak Mulyadi sebagai informan kunci yang merupakan pengamat politik,serta tokoh dari partai lain yang dinilai paham mengenai dunia perpolitikan saat ini.

<sup>7</sup> Emy Susanti, Hendarso, 2007. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan Penelitian Kualitatif Sebuah Pengantar. Jakarta :Prenada Media Group , hlm 171



### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan atau memperoleh data. Data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dengan teknik tertentu yang selanjutnya dikumpulkan dengan teknik tertentu yang selanjutnya disimpulkan secara induktif.<sup>8</sup> Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

#### a. Wawancara

Wawancara/ interview, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara atau tanya jawab secara langsung antara peneliti kepada informan atau narasumber. Maksud dan tujuan wawancara dalam penelitian ini adalah melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan (narasumber) terkait dengan proses pelaksanaan pelembagaan dan rekrutmen dalam menetapkan calon anggota legislatif pada DPD Partai Perindo di Kabupaten Kediri dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan fungsi Pelembagaan dan Rekrutmen dalam menetapkan calon legislatif pada DPD Partai Perindo di Kabupaten Kediri.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti melakukan wawancara dengan informan sebagai berikut:

- Wawancara dengan Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri (Bapak Heri Purnawirawan)
- Wawancara dengan salah satu anggota partai perindo kabupaten kediri

#### b. Dokumentasi

<sup>8</sup> Suharsimi, Arikunto, Op.Cit, hlm 17



Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, yaitu berasal dari dokumen-dokumen, buku-buku, surat kabar, majalah atau dapat juga berupa gambar atau catatan-catatan khusus yang relevan dengan penelitian serta data-data yang berlaku sekarang sebagai pendukung kebenaran sumber data. Dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong serta berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian bersifat alamiah sesuai dengan konteks dan berada dalam konteks. Data dokumentasi dalam penelitian ini meliputi, data keanggotaan Partai Perindo Kabupaten Kediri, daftar kader-kader yang mengikuti penjurangan anggota legislatif struktur organisasi DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri dan lain sebagainya yang terkait dengan permasalahan penelitian.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan sebagai berikut :<sup>9</sup>

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan penulis lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan tersebut kemudian direduksi oleh penulis dengan cara klasifikasi data dan selanjutnya dilakukan pemilihan terhadap data yang diperoleh. Kemudian dari data tersebut dipilih mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian yang akan diangkat. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung sampai laporan akhir tersusun.

#### 2. Penyajian Data

<sup>9</sup> Sugiyono. Op.Cit, hlm. 146.



Penyajian data (display data) dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun, yang diberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data yang paling umum digunakan pada tindakan. Dengan penyajian data ini, kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan agar memudahkan penulis untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data-data yang paling umum digunakan adalah bentuk teks uraian.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan (verifikasi data) dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Dapat dikatakan bahwa penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Dari hasil data-data yang diperoleh dilapangan tersebut kemudian dikumpulkan serta dianalisa untuk dapat ditarik kesimpulannya.

#### 3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif pada dasarnya dibutuhkan teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai usaha untuk meningkatkan derajat kepercayaan data. Apabila upaya melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat sesuai dengan teknik yang digunakan, maka hasil penelitiannya benar-benar dapat diperoleh dengan baik. Setelah diperoleh data yang sudah disusun secara sistematis dalam rangkuman yang jelas, maka langkah selanjutnya memeriksa keabsahan data, hal ini dilakukan dengan katagori data yang ada.

Dari hasil yang didapat kemudian penulis mengerutkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah data yang diperoleh tersebut dikelompokan, maka penulis memeriksa dan mengoreksi kembali keabsahan data tersebut dengan menggunakan teknik triangulasi.

Teknik ini merupakan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu.



Triangulasi data merupakan usaha untuk meningkatkan derajat kepercayaan data. Apabila penelitian menggunakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat sesuai dengan teknik yang digunakan, maka hasil upaya penelitian benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Setelah diperoleh data yang sudah disusun secara sistematis dalam rangkuman yang jelas, maka langkah selanjutnya memeriksa keabsahan data yang ada. Hal ini dilakukan dengan katagori yang ada.

Dari data yang sudah dikategorikan tersebut, kemudian dilakukan pengelolaan data sedemikian rupa yaitu dengan memanipulasi data agar data yang ada mempunyai makna sebagaimana yang tergambar dalam permasalahan, mulai dari menelaah dan mengelompokan data yang diperoleh baik primer maupun sekunder serta menganalisa dilihat dari permasalahan dari pelembagaan yang dilakukan oleh DPD Partai Perindo di Kabupaten Kediri. Dari hasil yang di dapat kemudian penulis mengurutkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah data diperoleh kemudian dikelompokan, maka penulis memeriksa dan mengoreksi kembali keabsahan data tersebut dengan menggunakan dua dari empat kriteria teknik pemeriksaan yaitu kepercayaan dan kepastian. Hal ini dilakukan sebelum sampai pada kesimpulan.



## BAB IV GAMBARAN UMUM

### 4.1 Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

Partai Persatuan Indonesia atau disebut dengan Partai Perindo dahulu berawal dari sebuah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh 3 inisiator, yaitu Hary Tanoesoedibjo, Ahmad Rofiq, dan Hendi Suparman. Ormas ini dideklarasikan menjadi partai politik oleh Hary Tanoesoedibjo pada 24 februari 2013 yang berfokus untuk memperjuangkan perubahan masyarakat, menciptakan generasi muda yang handal, dan sebagai lembaga kritik sosial.

#### 4.1.1 Visi dan Misi Partai Perindo

Transformasi partai perindo ini dibentuk dari organisasi kemasyarakatan menjadi partai politik merupakan hasil refleksi dan evaluasi yang mendalam terhadap kondisi dan perkembangan kehidupan bangsa yang menuntut adanya perubahan dan pembaruan. Partai perindo mempunyai visi “Mewujudkan Indonesia yang berkemajuan, adil, makmur, sejahtera, berdaulat, bermartabat, dan berbudaya”. Makna dari visi tersebut dapat diartikan sebagai berikut :

1. Indonesia berkemajuan adalah indonesia yang ditandai dengan majunya peradaban, tingginya tingkat pendidikan rakyat, meningkatkan derajat kesehatan, bertambahnya pendapatan dan daya beli masyarakat, makin kondusifnya iklim investasi dan usaha, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tegaknya hukum dan hak asasi manusia, berjalannya check and balance antar penyelenggara pemerintah negara, berfungsinya secara efektif partai politik dan pilar demokrasi lainnya, serta terpeliharanya keutuhan dan kedaulatan negara.
2. Indonesia bersatu adalah indonesia yang ditandai dengan tingginya derajat, integrasi bangsa, baik berupa integrasi tutorial, politik, ekonomi, sosial maupun budaya, tingginya



solidaritas dan kohesivitas sosial antar berbagai komponen bangsa, terpeliharanya pluralisme dan multikulturalisme, serta makin kokohnya persatuan, kerukunan, persaudaraan, dan wawasan kebangsaan dalam wadah negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

3. Indonesia adil adalah Indonesia yang ditandai dengan makin sempitnya jurang kesenjangan sosial dan kesenjangan antar daerah, terkoreksinya kebijakan negara dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan bias gender, serta terwujudnya pemberlakuan reward and punishment dan merit system, serta the right man on the right place dalam penyelenggaraan negara.
4. Indonesia makmur adalah Indonesia yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar dan material setiap warga negara yang sesuai dengan standart hidup yang layak bagi kemanusiaan, serta makin mudahnya dan terbukanya akses yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk mendapatkan keterbukaan informasi, pelayanan pendidikan dan kesehatan, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar yang wajib dipelihara oleh negara
5. Indonesia sejahtera adalah Indonesia yang ditandai dengan meluasnya kesempatan kerja sehingga akan meningkatkan pendapatan penduduk. Meningkatnya angka partisipasi murni anak usia sekolah, terpenuhinya sistem pelayanan umum bagi seluruh masyarakat seperti transportasi, komunikasi, penyediaan energi dan air bersih, terciptanya sistem perlindungan dan pelayanan kesehatan secara terpadu, terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil, merata, ramah lingkungan dan berkelanjutan serta terwujudnya kenyamanan dan rasa aman di masyarakat.
6. Indonesia berdaulat adalah Indonesia yang ditandai dengan tetap utuh dan terjaganya perbatasan wilayah teritorial negara, baik darat, laut, maupun, udara, berfungsinya pemerintahan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah



darah indonesia, makin dihormatinya eksistensi dan posisi negara kesatuan republik indonesia oleh seluruh bangsa dan negara di dunia, serta tidak adanya ketergantungan dan intervensi dari pihak manapun

7. Indonesia bermartabat adalah indonesia yang ditandai dengan terciptanya pribadi bangsa yang jujur, tangguh, cerdas, amanah, bertanggung jawab, dan memiliki standart etik dan moral yang tinggi, tingginya komitmen dan kepedulian negara terhadap pelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem, serta kuatnya motivasi rakyat untuk bangkit, maju dan berprestasi di bidang masing-masing untuk membangun kehidupan lebih baik di masa depan.
8. Indonesia berbudaya adalah indonesia yang ditandai dengan tingginya kepedulian negara terhadap dunia pendidikan yang berperan sentral sebagai motivator terwujudnya kebudayaan yang tinggi, dan memberikan nilai manfaat untuk meningkatkan kualitas manusia yang ikut menentukan corak dan kualitas kebudayaan, serta makin berkembangnya dan lestarnya tradisi, seni dan budaya nasional yang mengandung filsafah dan nilai leluhur untuk kehidupan masyarakat yang lebih bermakna.

Dengan mengusung visi tersebut, ada beberapa misi yang dijalankan oleh Partai Perindo yaitu

1. Mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum sesuai dengan UUD 1945.
2. Mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme untuk indonesia yang mandiri dan bermartabat
3. Mewujudkan indonesia yang berdaulat, bermartabat dalam rangka menjaga keutuhan NKRI



4. Menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia.
5. Menegakan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang sesuai Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum guna melindungi kehidupan rakyat, bangsa dan negara
6. Mendorong tumbuhnya ekonomi nasional yang berkontribusi langsung pada kesejahteraan warga negara Indonesia

#### 4.1.2 Platform Partai Perindo

Identitas nilai berkenaan dengan identitas partai politik berdasarkan ideologi dan platform partai, berkaitan dengan basis sosial pendukungnya, dan identifikasi kader terhadap pola dan arah perjuangan yang akan diperjuangkan oleh partai politik. Dalam platform ini menjelaskan bahwa nilai yang menjadi arah organisasi dalam merumuskan berbagai aksi.

Konsistensi setiap elemen partai terhadap nilai perjuangan (ideologi dan platform), mengidentifikasi sebuah organisasi partai terlembaga secara baik.

Platform partai Perindo sendiri adalah mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan kesejahteraan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, partai Perindo harus melalui sebuah perubahan yang menyeluruh, sistematis, terpadu dan terarah. Oleh karena itu, partai Perindo mendorong secara optimal untuk terwujudnya Indonesia sebagai negara kesatuan berdasarkan Pancasila, karena telah memiliki lima prinsip negara kesejahteraan. Hal ini juga diungkapkan oleh sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri.<sup>2</sup>

*“Untuk Indonesia Sejahtera sudah menjadi tagline partai Perindo, jadi minimal para anggota mengerti apa yang dimaksud dengan Indonesia Sejahtera ini, contohnya, bahan baku kita beras jadi jangan sampai kita mengimport beras. Itu contoh yang seharusnya dilakukan oleh partai untuk lebih mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat”*

<sup>2</sup> Wawancara dengan Moch. Asrofi (Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri) hari Senin 25 April 2017 di DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri Jl. Airlangga No.155 Katang Kediri



Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dengan segala sumber daya yang dimiliki sudah semestinya bersama kekuatan masyarakat lainnya ambil peranan dalam pembangunan kesejahteraan yang merupakan bagian integral dari pembangunan bangsa. Partai perindo disini hadir untuk menginspirasi partai-partai politik dan kekuatan masyarakat lainnya agar lebih peka dan peduli terhadap masalah kesejahteraan, guna untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang masih jauh berada di bawah garis kemiskinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses politik dan demokrasi karena telah terpenuhi segala kebutuhan dasar hidupnya.

Dalam masyarakat yang sudah sejahtera, stabilitas politik dan demokrasi akan terwujud karena rasionalitas lebih didahulukan dari pada emosionalitas dalam menghadapi semua masalah apapun yang berkaitan dengan partai. Untuk itu partai perindo mempunyai keyakinan bahwa stabilitas politik dan kualitas demokrasi di Indonesia akan terwujud apabila kebutuhan dan hak dasar rakyat terpenuhi. Apabila kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia tercapai, maka dalam pandangan partai perindo persatuan Indonesia akan semakin kokoh, kemajemukan bangsa akan tetap terpelihara, dan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 akan terwujud, karena kesejahteraan adalah instrumen pendorong bagi meningkatnya loyalitas dan produktivitas.

#### 4.1.3 Makna Lambang Partai Perindo

##### Lambang Partai Perindo





## **PARTAI PERINDO** **PERSATUAN INDONESIA**

Arti warna pada logo Partai Perindo :

1. Burung Rajawali dengan mata yang tajam menatap ke depan, bermakna optimisme akan masa depan Indonesia merdeka, berdaulat, sejahtera, berbudaya dan bermartabat. Burung rajawali juga melambangkan kebebasan, keberanian, menunjukkan kebebasanberfikir dan keberanian
2. Kapak sayap berjumlah 5 helai melambangkan asas partai perindo adalah Pancasila
3. Warna merah putih bermakna nasionalisme kebangsaan dan semangat republikanisme yang terpatri dalam prinsip, sikap dan tindakan.
4. Warna biru bermakna kedalaman berfikir dalam mengemban misi persatuan Indonesia. Warna biru menunjukkan semangat perdamaian yang selalumewarnai gerak dan langkah partai mengemban amanat rakyat Indonesia.

### **4.1.4 Sejarah DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri**

Dulu DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri terbentuk berawal dari sebuah percakapan antara Bapak Heri Purnawirawan dengan Bapak Moch. Asrofi ingin masuk ke dalam Partai Perindo karena keduanya melihat bahwa partai perindo mempunyai visi misi dengan



keduanya yang sama yaitu membentuk kabupaten kediri lebih baik disektor lapangan pekerjaan.<sup>3</sup>

“....Dulu saya sama bapak Heri Purnawirawan waktu sama-sama menjadi anggota dewan sempat berfikir tentang partai ini (Perindo) yang masih hangat di kediri dan kayaknya mempunyai visi dan misi yang baik, maka kami ikut bergabung dengan partai. Awalnya kami mendaftar menjadi anggota di Kota Kediri dan setelah beberapa bulan saya dan bapak Heri diber mandat untuk menjadi promotor dalam partai ini di kabupaten kediri, dan itupun menjadi tantangan bagi kami untuk membentuk DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri...”

Sampai saat ini mereka bersama 9 anggota inti masih terus berusaha untuk meyakinkan masyarakat kabupaten kediri bahwa partai perindo mampu membangkitkan ekonomi masyarakat kabupaten kediri dengan melakukan bakti sosial dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya.

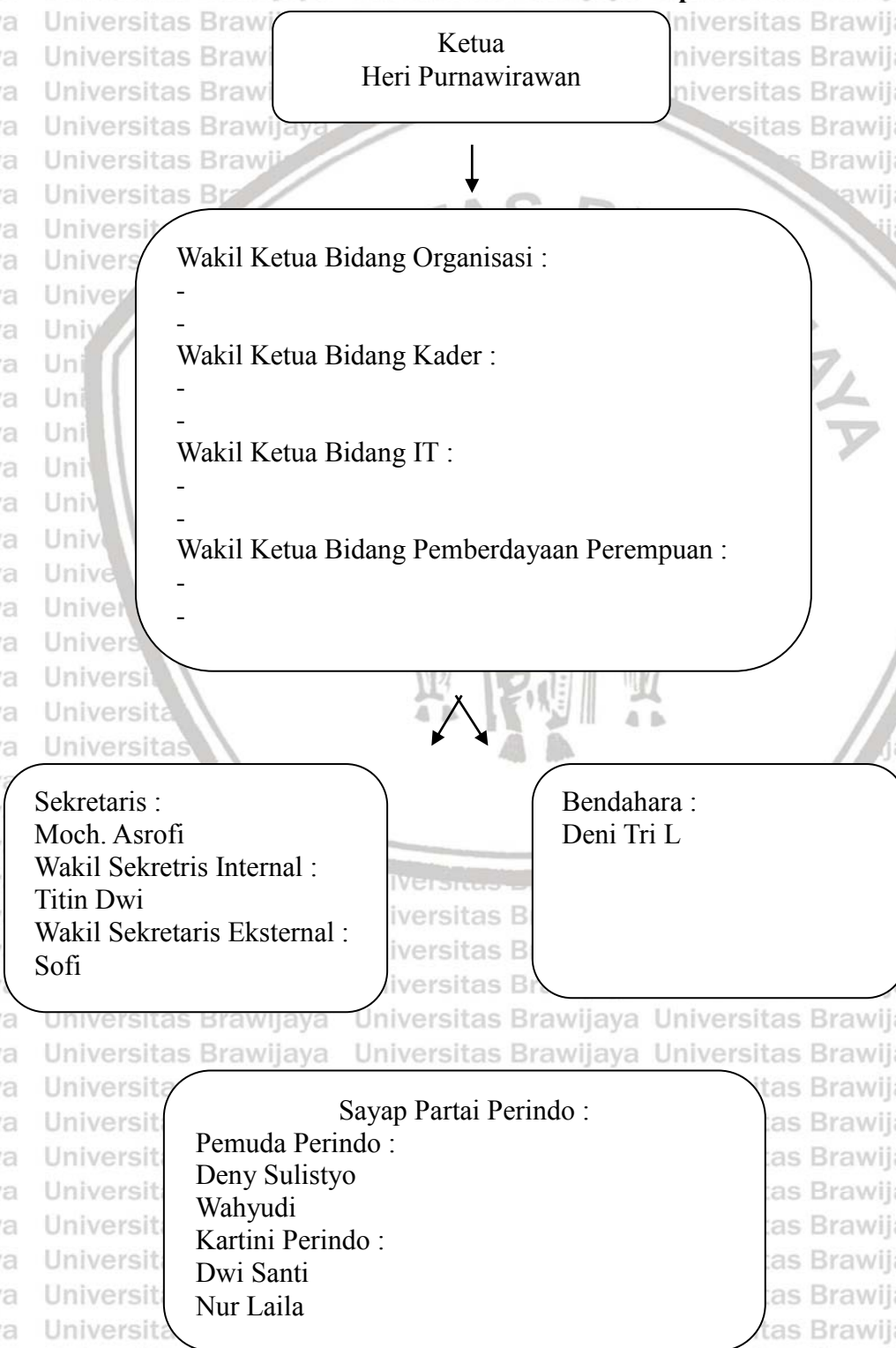


<sup>3</sup> Wawancara dengan moch. Asrofi (Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri) hari senin 25 april 2017 di DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri Jl. Airlangga No.155 katang kediri



#### 4.1.5 Struktur DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri

##### Struktur DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri





Sumber : data sementara didapat oleh peneliti tanggal 25 april 2017

Total pengurus inti partai perindo kabupaten saat ini masih sekitar 9 orang, terdiri dari ketua sekretaris dan bendahara serta pemuda perindo dan kartini perindo, untuk calon wakil ketua di bidangnya yang sampai saat ini partai perindo masih memilih siapa yang pas untuk dijadikan wakil ketua Partai Perindo Kabupaten kediri,<sup>4</sup> latar belakang politik pengurus inti tersebut sebelumnya juga pernah bergabung dalam partai PDI, PKNU, dan PKB

“Untuk saat ini kami masih terus berupaya untuk melakukan pemilihan calon wakil sesuai di bidangnya agar mereka semua bisa membantu pekerjaan ketua agar lebih baik dan mudah, sudah ada beberapa anggota kami yang kami pantau untuk dijadikan wakil ketua di bidangnya masing-masing...”

#### 4.1.6 AD/ ART DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri

Hal ini diambil oleh DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri dikarenakan Partai Perindo partai baru dan masih membutuhkan calon-calon kader yang tepat untuk menjadi kader yang benar- benar mampu membawa indonesia sejahtera.

Menurut AD/ART, jenjang kader di DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri adalah :

1. Kader Pemula : anggota yang belum mengikuti pengkaderan
2. Kader Dasar : anggota yang telah mengikutrti kaderisasi yang diadakan oleh DPD
3. Kader Madya : anggota yang telah mengikuti kaderisasi yang diadakan oleh DPW
4. Kader Paripurna : anggota yang telah mengikuti kaderisasi yang diadakan oleh DPP

Jadi untuk saat ini di DPD Partai Perindo kabupaten Kediri hanya ada kader Madya dan Kader Paripurna, sementara kader yang lain masih menjadi kader pemula meskipun kader tersebut sudah pernah ikut di partai lain. Hal tersebut dikarenakan kader pemula belum menerima sistem pendidikan yang diberikan oleh DPD maupun DPW. Namun DPD Partai

<sup>4</sup> Wawancara dengan Heri purnawirawan (ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri) hari senin 25 april 2017 di DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri Jl. Airlangga No.155 katang kediri



Perindo Kabupaten Kediri belum mempunyai data yang cukup lengkap mengenai jumlah kader seperti kualifikasi di AD/ART.

Calon Kader DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri dibentuk untuk mampu berpartisipasi dalam partai itu bukan untuk pribadinya sendiri. Harapannya setelah anggota-anggota partai mendapat kesempatan untuk berada di legislatif maupun eksekutif, mereka sudah terbiasa dengan berbagai wawasan kebangsaan, maupun bagaimana cara mengambil manfaat dari masyarakat sekitar. Semua itu mengacu pada kesejahteraan, dan programnya juga lebih ditekankan pada masyarakat menengah kebawah.

#### **4.1.7 Garis Koordinasi Partai Perindo Di kabupaten Kediri**

Pada dasarnya garis koordinasi partai merupakan gambaran representasi dari garis koordinasi yang terdapat didalam organisasi. Hal ini juga berlaku sama pada partai politik yang ada di Indonesia khususnya yang terdapat di Kabupaten Kediri. Garis koordinasi itu secara vertikal yaitu dari DPP kemudian ke DPW. Selanjutnya dari DPW kemudian turun ke DPD dan yang terakhir paling bawah adalah DPC.

Berdasarkan tugas dasar dari perekrutan kader, sebenarnya tugas untuk perekrutan kader partai dilakukan oleh DPC. Hal ini dilakukan mengingat DPC merupakan struktur organisasi terbawah pada Partai Perindo dan bersentuhan secara langsung pada masyarakat. Pada kasus ini, DPC di Kabupaten Kediri belum dirumuskan dan diresmikan oleh pihak pengurus pusat di Jakarta sehingga perekrutan kader belum bisa dilaksanakan secara maksimal dan terbuka dikarenakan belum ada izin resmi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka tugas perekrutan kader untuk sementara waktu masih dilakukan oleh pihak DPD Partai Perindo Kota Kediri untuk sementara waktu sembari mempersiapkan DPC. Kebijakan ini diambil oleh pengurus pusat partai dikarenakan partai juga mempersiapkan segala persiapan untuk pesta demokrasi yang ada di Indonesia maupun pesta demokrasi yang ada di kota-kota seluruh Indonesia.



## 4.2 Rekrutmen DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri

Di dalam rekrutmen yang di lakukan oleh DPD Partai Perindo di Kabupaten Kediri menggunakan prosedur terbuka seperti di kemukakan oleh sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri. Perekrutan yang dilakukan oleh DPD Partai Perindo sangat terbuka untuk umum. Siapa saja yang ingin masuk menjadi anggota sangat di persilahkan.<sup>5</sup>

“...untuk menjadi anggota partai kami tidak memiliki syarat khusus, intinya semua boleh bergabung dengan partai ini, partai ini terbuka untuk semua golongan dan semua kalangan...”

Berdasarkan penjelasan narasumber, alur perekrutan pada awalnya menjaring anggota masyarakat yang akan masuk pada Partai Perindo. Hal ini tertuang pada AD/ART Partai Perindo Bab VI tentang keanggotaan pasal 10 mengenai keanggotaan. Tertuang pula pada Bab VII tentang pendidikan politik dan sistem kaderisasi pasal 14 dan 15.

Seorang anggota masyarakat yang akan masuk partai pada awalnya merupakan kader pemula. Kader pemula dapat berubah menjadi kader dasar apabila anggota kader pemula tersebut sudah mengikuti pelatihan dan penanaman nilai dan sudah dilantik oleh perwakilan dewan pusat dari Partai Perindo. Mengacu pada AD/ART tersebut, maka pengurus Partai Perindo saat ini melakukan kebijakan menjaring anggota masyarakat Kabupaten Kediri untuk dijadikan kader pemula pada. Apabila jumlah dari anggota kader pemula ini sudah dirasa cukup, maka dewan pimpinan pusat akan mengadakan pelatihan dasar selama dua atau tiga hari. Pelatihan tersebut berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai dan ideologi yang dianut oleh Partai Perindo kepada anggota yang mengikuti pelatihan dasar.

### 4.2.1 Strategi Dalam Merekrut Calon Anggota Partai Perindo

Di sini Partai Perindo Kabupaten Kediri dalam merekrut calon anggota partai dengan melakukan berbagai banyak hal agar masyarakat umum khususnya Kabupaten Kediri agar tertarik untuk bergabung dengan partai ini, dengan turun langsung ke masyarakat melakukan

<sup>5</sup> Wawancara dengan Heri purnawirawan (ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri) hari senin 25 april 2017 di DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri Jl. Airlangga No.155 katang Kediri



kegiatan sosial dan kegiatan olahraga agar mereka paham bahwa partai perindo memang benar ada di kabupaten kediri dan ingin mewujudkan indonesia sejahtera.

#### 4.4.2 Sasaran Yang Dituju Untuk Calon Anggota Partai Perindo

Di dalam partai politik tanpa rekrutmen calon anggota tidak berarti apa-apa, hukum alamnya seperti manusia akan mengalami tua dan penurunan daya kemampuan jadi butuh regenerasi. Sama halnya dengan partai politik butuh calon anggota yang profesional, transparan serta jujur. Di dalam partai perindo kabupaten kediri pun melakukan hal yang mampu membawa partai ini lebih baik dengan merekrut calon anggota yang profesional, transparan dan jujur. Di sini sasaran partai perindo untuk saat ini yaitu kalangan pemuda-pemuda yang mempunyai ide-ide pemikiran yang sangat kreatif, yang nantinya kami bantu untuk menjadi kader yang luar biasa untuk mensejahterakan indonesia.





## BAB V

## REKRUTMEN POLITIK PARTAI PERINDO KABUPATEN KEDIRI

## 5.1 Pelembagaan DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri

Berbagai dinamika politik yang dirasakan masyarakat terhadap partai politik saat ini merupakan cerminan bahwa partai politik di Indonesia mengalami permasalahan dalam hal pelembagaan. Indonesia sebagai negara yang memiliki sistem demokrasi perlu adanya partai politik yang kuat dalam menjalankan fungsi dan perannya serta mengakar, baik pada konsituennya maupun terhadap masyarakat secara umum. Seperti yang dijelaskan dalam buku Politik dan Pemerintahan Indonesia yang menjelaskan bahwa pelembagaan partai politik adalah proses pematangan partai politik baik dalam perilaku yang memiliki pola maupun sikap atau budaya.<sup>1</sup>

Pelembagaan pada indikatornya dapat diukur dari dua aspek yang berkaitan satu sama lain. Aspek itu adalah aspek internal dan aspek eksternal. Bila kedua aspek internal dan eksternal tersebut dipersilangkan akan menghasilkan indikator ukuran berupa empat hal diantaranya adalah :

1. Derajat kesisteman (*systemness*) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural.
2. Derajat identitas nilai (*value infusion*) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural.
3. Derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural.
4. Derajat pengetahuan atau citra publik (*reification*) terhadap suatu partai politik sebagai persilangan aspek eksternal dengan kultural.

<sup>1</sup> Ramses M, Andy. et al. 2009. *Op. Cit* hlm.137



Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelembagaan dan rekrutmen yang dijalankan oleh DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri dengan meninjau dari empat aspek kelembagaan partai politik menurut Mathias Basedau dan Alexander Stroh yang meliputi akar partai dimasyarakat, otonomi, keorganisasian partai politik serta koherensi.

### 5.1.1 Akar Partai Perindo Di Masyarakat

Kelembagaan dan keorganisasian yang kuat memungkinkan partai politik untuk mengakar, melakukan perluasan jaringan dan menggerakkan mesin organisasi politik secara efektif guna untuk mempengaruhi masa pemilih. Keberhasilan partai politik untuk memiliki kelembagaan yang kuat dan mengakar ini berdampak pada dua hal, yaitu akan memperkuat stabilitas partai politik dalam menghadapi kompetisi kepartaian dan memperkuat kemampuan partai politik untuk mempertahankan sumber-sumber dukungan elektoralnya.

Indikator yang mempengaruhi akar partai di masyarakat yaitu bagaimana DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri mampu menjalin hubungan dan berkomunikasi dengan organisasi masyarakat sipil. Pihak DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri sudah beberapa kali melakukan kegiatan seperti berbagi gerobak gratis dan DPD Partai Perindo di Kabupaten Kediri juga mengadakan turnamen bola volly antar kecamatan di Kecamatan Kepung tepatnya.<sup>2</sup>

“kami telah mengadakan turnamen bolla volly di kepung, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk silaturahmi antara pengurus dan warga sekitar, sekaligus mengajak warga lainya untuk membiasakan diri untuk berolahraga..”

Kegiatan tersebut menunjukan ke masyarakat bahwa Partai Perindo bukan hanya partai event yang hanya melakukan kegiatan menjelang pemilihan-pemilihan umum maupun pemilihan lainya. Jadi Partai Perindo sadar bahwa mereka partai baru dan harus bahkan wajib untuk mengajak anggota-anggotanya untuk turun sendiri ke lapangan. Jadi di sini ketua partai

<sup>2</sup> Wawancara dengan Moch. Asrofi (sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri) di Kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri Jl. Airlangga 115 Katang



perindo mengerti bahwa partai perindo merupakan partai baru, khususnya di kabupaten kediri. Perlu pendekatan lebih ke masyarakat bahwasanya partai perindo merupakan partai yang benar-benar ingin mewujudkan indonesia sejahtera.

Secara umum untuk partai perindo sudah banyak yang tau, namun adanya pengurus DPC di setiap wilayahnya masih banyak yang belum mengerti. Dengan terbentuknya pengurus di posisi bawah tentu secara logika masyarakat akan mengerti keberadaan pengurus DPC di setiap wilayahnya. Untuk saat ini DPD kabupaten kediri terus menambah jumlah anggotanya dan akan menetapkan kader yang siap untuk diajak berkerja sama dengan apa yang diharapkan oleh partai.

Untuk saat ini Partai Perindo memiliki oraganisasi pemuda perindo serta kartini perindo. Untuk setiap organisasi sampai saat ini masih belum di tetapkan siapa yang berhak atas jabatan sebagai ketua pemuda perindo serta kartini perindo.<sup>3</sup>

“sampai saat ini belum ditetapkan siapa yang menjadi sebagai ketua pemuda perindo serta kartini perindo kabupaten kediri , tapi sudah ada anggota yang siap membantu untuk menjalankan tugas dari pemuda perindo serta kartini perindo”

Dengan menyangang partai baru dan ingin benar-benar menyakinkan masyarakat kabupaten kediri siapa yang terpilih menjadi ketua baik pemuda perindo dan kartini perindo diharapkan mampu memilikistrategi yang tepat agar partai ini mampu berjlan dengan baik dan seperti yang diinginkan. Seperti tertarik dengan perubahan serta pembaharuan yang diusung oleh Hary Tanoesoedibjo selaku ketua umum.

### 5.1.2 Otonomi Partai Politik

Otonomi yang dilakukan sebuah partai politik yaitu dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan hubungan partai politik dan aktor dari luar partai politik baik dari sumber otoritas (kekuasaan), maupun dengan sumber dana (ekonomi) atau bahkan sumber dukungan

<sup>3</sup> Wawancara dengan Moch. Asrofi (sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri) di Kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri Jl. Airlangga 115 Katang



yang berasal dari organisasi masyarakat tertentu.<sup>4</sup> Pada tingkat tertentu, otonomi berarti kebebasan organisasi dan intervensi dalam menentukan kebijakan partai.

Indikator yang mempengaruhi otonomi partai yaitu tentang bagaimana setiap pengambilan keputusan baik program dan hal-hal yang bersifat pribadi partai dilakukan secara independen. DPD merupakan Dewan Pimpinan Daerah dengan skala Kota/Kabupaten, Sedangkan DPC adalah Dewan Pimpinan Cabang dengan skala kecamatan. Menurut hirarki organisasi, maka DPD mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada DPC, akan tetapi untuk program kerja yang digunakan adalah melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan akan diambil bersama, sehingga DPC pun turut serta untuk membantu memberi masukan-masukan.

Otonomi yang berlaku dalam DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri ialah secara kolektif, atau dimana setiap pengambilan keputusan diputuskan secara bersama-sama. Hal ini diungkapkan oleh ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri Bapak Heri Purnawirawan.<sup>5</sup>

“.....kalau yang namanya partai, sayajadi ketua, saya nggak mau ada keputusan dari saya sendiri. Semua keputusan akan tetap kita ambil disaat rapat. Kalau tidak ada kesalahan, tidak mungkin kita belajar. Meskipun ketua saya tidak mau menang sendiri.....”

### 5.1.3. keorganisasian Partai Politik

Organisasi yang diarahkan untuk melakukan perebutan kekuasaan politik melalui pemilu, partai politik dihadapkan pada pilihan-pilihan untuk mengembangkan sumber daya yang telah dimiliki, seperti jaringan organisasi, anggota, massa dan pendanaan guna mendukung kepentingan-kepentingan elektoralnya. Dengan sumber daya yang telah dimiliki partai politik mampu membangun kontak-kontak dengan pemilih dan mempengaruhi sikap politik pemilih agar menjadi partisipan.

<sup>4</sup> Andi Rahmat Hidayat, *Op. Cit*, hal. 79

<sup>5</sup> Wawancara dengan Heri Purnawirawan (ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri) di Kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri Jl. Airlangga 115 Katang



Indikator yang mempengaruhi keorganisasian yaitu partai mampu menampung dan menseleksi kandidat kader yang datang dari masyarakat eksternal partai dan menyeleksi sesuai dengan aturan yang telah ada di dalam partai politik tersebut. Keorganisasian partai politik yang kuat diperlukan untuk mendukung kerja mesin partai dalam melakukan mobilisasi politik secara luas. Keorganisasian yang kuat juga diperlukan ketika partai menghadapi situasi misalnya menghadapi masalah ancaman penurunan jumlah pemilih.

Di DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri tidak ada penyeleksian kader. Karena Perindo merupakan partai baru di Kabupaten Kediri dan membutuhkan banyak anggot, dan setiap anggota yang mendaftar tidak terlibat di partai lain dan harus memiliki KTP. Jadi untuk ketentuan anggota dan pengurus di seluruh Indonesia itu sama saja. Siapapun boleh berpartisipasi tetapi di domisil masing-masing karena KTA yang dipakai sesuai dengan nomor KTP, link yang tertera sama dengan kependudukan. Jadi begitu memasukan nama dan nomer KTP, langsung dari kependudukan yang akan muncul.

#### 5.1.4 Koherensi Partai Politik

Aspek ini mencakup pada sejauh mana aktor-aktor partai politik dan para pendukungnya memiliki komitmen terhadap partai politik lebih dari sekedar alat atau insetif pribadi atas keterlibatannya. Lebih jauh penanaman ini terkait dengan keberhasilan partai politik dalam menciptakan kulturnya yang khas dan dapat dilihat sebagai alat perekat partai politik.<sup>6</sup> Kedua faktor tersebut dalam praktisnya adalah budaya organisasi yang ditetapkan dalam berinteraksi oleh para anggota.

Indikatornya yaitu tentang koherensi kelompok-kelompok parlemen (tidak loncat pagar). Indikator ini menghendaki pada terlembagaanya suatu partai politik jika kader partai yang terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat baik pusat maupun daerah tidak melakukan hal yang

<sup>6</sup> Akbar Tandjung, *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbelensi Politik Era Refoermasi*, sebagaimana dikutip oleh Harja Saputra, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Survival Partai Politik", <http://www.harjasaputra.com/riset/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-survival-partai-politi.html>, diakses pada tanggal 26 juni 2017 pukul 19.30



merugikan partai, seperti kader yang melakukan tindakan yang meninggalkan partai dan berpindah partai lain dengan alasan yang tertentu. Hal ini yang dilakukan DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri dengan dilakukannya pembinaan, salah satunya dengan pendidikan politik yang berkaitan dengan berbagai kegiatan:<sup>7</sup>

1. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinika Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik;
3. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan

Partai politik berbeda dengan ormas, jika di ormas untuk loncat pagar itu tidak mudah karena memang harus mampu memahami ideologinya, bagaimana arah perjuangannya, dan kemana arah arus berjuang. Tetapi jika di dunia perpolitikan ini ada kepentingan, ketika kepentingan itu tidak tercapai maka kader bisa saja keluar atau lompat pagar.

Organisasi kemasyarakatan pada dasarnya melakukan kerja-kerja politik, kerja-kerja sosial dan kemasyarakatan.<sup>8</sup> Organisasi kemasyarakatan juga berusaha paling tidak mendorong adanya perubahan kebijakan untuk memperjuangkan masyarakat. Namun demikian akses politik sangat menentukan keberhasilan sebuah kerja politik. Partai politik untuk konteks ini, memiliki akses yang lebih luas pada kerja-kerja politik, baik dalam mengubah ataupun merumuskan kebijakan negara.

Untuk mengikat kader menjadi militan itu sulit jika bukan ormas. Misalnya ada kader yang membangun partai puluhan tahun, ketika ada yang tidak sesuai dengan pemikiran dia, kemudian dia kecewa dan pindah ke partai lainya. Dalam regulasi pun tidak ada yang membatasi kader untuk pindah ke partai lain, dan itu sah-sah saja selama alasannya masuk

<sup>7</sup> Undang-undang No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 34 ayat (3b)

<sup>8</sup> Komite Pemantau Legislatif Indonesia, *Pembiayaan Partai Politik Sulawesi Selatan 2013*, Jakarta; Kemitraan Partnership, 2013, hal.27



akal, yang terpenting adalah orientasinya keada tugas aparat partai politik, yaitu mengabdikan untuk organisasi dan rakyat.

### **5.1.5 Kendala Pelembagaan DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri**

Masalah yang paling krusial dalam pelembagaan partai politik adalah terkait dengan pendanaan partai, karena urusan keuangan partai politik dapat mempengaruhi elemen kelembagaan lain, seperti pola kepemimpinan dan kekuasaan, rekrutmen kader yang potensial, serta penemuan kader partai yang di majukan dalam pemilu. Misalnya dengan dana yang minim, sebuah partai politik tidak dapat melakukan sistem pengkaderan dengan efektif sebagaimana mestinya. Sedangkan dalam penentuan kader dapat berpengaruh pada jumlah yang mencalonkan diri, karena tidak mungkin dengan adanya dana yang minim sebuah partai politik dapat melakukan kampanye dengan maksimal.

Kendala yang terjadi di DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri ini adalah lemahnya pelembagaan partai politik yang belum munculnya pola partai kader. Partai politik cenderung membangun paratatai massa yang memiliki ciri-ciri: meningkatnya aktifitas hanya menjelang pemilu, menganut sistem keanggotaan yang amat longgar, belum memiliki sistem seleksi panjang partai. Partai yang serius mempersiapkan dan melaksanakan kaderisasi dengan baik akan mendorong perkembangan dan pertumbuhan partai tersebut di masa depan.

### **5.2 Rekrutmen DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri**

Berdasarkan pada teori pelembagaan diatas, rekrutmen merupakan salah satu aspek yang terdapat didalam pelembagaan. Definisi rekrutmen dapat diartikan sebagai proses dimana lembaga menempatkan aktor-aktor yang terdapat didalam lembaga tersebut untuk mengambil kebijakan-kebijakan dan mengambil tempat dalam posisi lembaga yang bersangkutan, dalam hal ini yang dimaksud adalah partai politik. Proses ini dimaksudkan untuk menjaring orang-



orang ataupun individu-individu yang berbakat untuk ikut andil dalam proses penanaman nilai-nilai (*value*) yang menjadi visi dan misi dari partai politik tersebut.<sup>9</sup>

Definisi rekrutmen politik sendiri dapat diartikan sebagai proses aktor-aktor dalam partai untuk menjaring orang ataupun individu-individu yang dinilai memiliki bakat dan potensi untuk ikut serta dalam proses regenerasi dan ikut andil dalam memajukan partai. Selanjutnya individu yang sudah menjadi anggota dapat menempati posisi atau jabatan tertentu dalam partai untuk ikut dalam proses politik internal dalam hal ini yaitu partai politik maupun politik eksternal seperti pilkada atau pemilu.

Miriam Budiardjo, mendefinisikan rekrutmen politik sebagai proses melalui mana partai politik mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.<sup>10</sup> Dari definisi yang diungkapkan tersebut dapat tergambar lebih menekankan proses rekrutmen politik ditempuh sebagai upaya mencari anggota baru dengan maksud menjaga kelangsungan hidup partai. Proses rekrutmen dalam model ini memang akan kelihatan lebih terletak pada faktor kuantitatifnya, dengan merekrut sebanyak-banyaknya orang atau kelompok untuk menjadi anggota partai.

Penyeleksian anggota baru ini berkaitan dengan upaya untuk mempertahankan proses-proses dalam partai politik dan kelangsungan kegiatan dalam partai politik tersebut. Proses rekrutmen politik ini juga bertujuan untuk menyiapkan calon-calon pemimpin masa mendatang. Mereka diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan partai politik tersebut. Agar proses perekrutan dapat berjalan lancar, maka dibutuhkan sistem dan mekanisme perekrutan yang padu. Dalam hal ini terdapat dua mekanisme yang dijabarkan oleh Lily Romli yang mengemukakan bahwa dalam hal rekrutmen politik ada dua

<sup>9</sup> Budi, Winarno. 2010. *Analisa dan Proses dalam Kebijakan Partai*. Jakarta. Pt Gramedia.

<sup>10</sup> Budiardjo, Miriam, 1981. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm.164



mekanisme yang bisa dijalankan oleh partai politik, yaitu rekrutmen yang terbuka dan tertutup.<sup>11</sup>

1. Model rekrutmen terbuka, artinya semua warga Negara yang memenuhi syarat tertentu (seperti kemampuan kecakapan, umur, keadaan fisik) mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam pemerintah. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya cukup tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan berhasil keluar sebagai jawara. Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya tentang keadaan masyarakat serta nilai moral yang melekat dalam dirinya termasuk integritasnya, model rekrutmen ini juga memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menilai kemampuan elite politiknya. Biasanya model rekrutmen ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang kredibilitas dan mempunyai integritas tinggi.

2. Model rekrutmen tertutup, kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas ser integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil elite itu sendiri serta berdasarkan kedekatan, kedekatan itu bisa berupa Hubungan Darah, Golongan, etnis dan lainnya.

Mengacu pada penjabaran teori pelebagaan dan rekrutmen diatas, Partai Perindo Kabupaten Kediri menggunakan pendekatan pelebagaan partai politik. Hal ini dikarenakan Partai Kediri memiliki izin resmi dari negara serta memiliki visi dan misi untuk ikut memajukan Negara indonesia. Selain itu dalam pelebagaan Partai Perindo khususnya Kabupaten Kediri memiliki alur koordinasi dan legal formal yang kuat dan jelas. Hal ini berguna untuk menunjang kelancaran proses perekrutan partai.

Berdasarkan pemaparan Heri Purnawirawan dan Mochammad Asrofi selaku ketua serta sekretaris Partai Perindo Kabupaten Kediri, mekanisme yang digunakan untuk proses perekrutan anggota menganut sistem perekrutan terbuka karena Partai Perindo merupakan

<sup>11</sup> Lili Romli, 2005. *Pilkada Langsung, Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal*, Jakarta: Jurnal Analisis CSIS 34, No.3, hal 19



partai baru di Kabupaten Kediri sehingga terdapat hambatan jumlah anggotanya untuk lolos verifikasi yang dinilai oleh KPU Pusat dan KPU Kabupaten Kediri masih belum layak untuk mengikuti proses pesta demokrasi wilayah setempat. Oleh karena itu untuk saat ini fokus dari perekrutan anggota partai adalah kuantitas dari anggota Partai Perindo Kabupaten Kediri agar target verifikasi partai dapat disahkan oleh KPU Pusat dan KPU Kabupaten Kediri.

Menurut pemaparan narasumber bahwasanya fokus kuantitas anggota akan dikuatkan terlebih dahulu sebelum menuju fokus selanjutnya yaitu kualitas dari anggota partai. Proyeksi yang dibutuhkan untuk menguatkan kualitas anggota partai diperkirakan dalam waktu lima tahun ke depan sehingga untuk kedepannya apabila Partai Perindo Kabupaten Kediri sudah mendapat verifikasi KPU, mereka dapat membangun kualitas anggota serta suara membangun basis massa yang loyal dan kuat di kalangan masyarakat Kabupaten Kediri.

Menurut sekretaris Partai Perindo selaku narasumber, untuk mendapatkan basis massa yang kuat serta loyal maka dibutuhkan strategi-strategi agar dapat diterima oleh masyarakat setempat guna melakukan proses rekrutmen sekaligus membangun silaturahmi kepada masyarakat Kabupaten Kediri agar daya minat masyarakat terhadap Partai Perindo semakin meningkat.<sup>12</sup>

“untuk menjadi partai yang kuat perlu basis massa yang kuat dan loyal, maka disini kami mengatur strategi bagaimana agar partai kami diterima oleh masyarakat kabupaten kediri agar daya minat terhadap partai ini semakin meningkat”

Dalam hal ini sekretaris partai menyadari bahwa posisi partai ini masih baru sehingga anggota partai diinstruksikan oleh pejabat partai untuk mampu beradaptasi dengan budaya dan kultur lokal masyarakat Kabupaten Kediri sehingga mau tidak mau mereka yang turun langsung ke masyarakat dengan dibantu simpatisan Partai Perindo Kabupaten Kediri.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Moch. Asrofi (sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri) di Kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri Jl. Airlangga 115 Katang



Strategi yang dilaksanakan oleh Perindo pertama-tama untuk menarik simpatisan masyarakat yaitu dengan membagikan rombongan gratis yang diberikan oleh partai perindo untuk masyarakat yang mempunyai rombongan kurang layak untuk dibuat berjualan, serta melakukan kegiatan turnamen bola volly yang dilakukan Partai Perindo Kabupaten Kediri di Kecamatan Kepung hal ini dilakukan untuk silahturohmi serta menarik simpatisan agar berminat untuk gabung ke dalam Partai Perindo khususnya para pemuda yang hobi bola volly.

Khusus bagi masyarakat yang ingin mendapatkan rombongan gratis yang harus dilakukan adalah datang ke kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri dengan melakukan pendaftaran sebagai anggota Partai Perindo serta menunjukkan foto rombongan saat ini dan disertakan KTP atau identitas lain jika belum memiliki KTP. Alur ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan dari masyarakat yang hanya ingin memanfaatkan program rombongan gratis yang dimiliki Partai Perindo. Dengan demikian penggunaan strategi ini akan memberikan timbal balik antara masyarakat Kabupaten Kediri dengan Partai Perindo, dalam hal ini masyarakat mendapatkan keuntungan dari program tersebut sedangkan pihak Partai Perindo mendapatkan keuntungan dengan bertambahnya jumlah anggota partai.

Tujuan ini sejalan dengan fokus Partai Perindo yang memfokuskan kuantitas jumlah anggota demi lolos verifikasi KPU. Dalam sistem rekrutmen yang dilakukan DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri tidak ada kriteria, jika masyarakat mampu menjadi anggota nanti akan dibina oleh pengurus.<sup>13</sup>

“.....Mencari anggota itu yang penting dimulai dari satu rumah dulu, kalau satu rumah sudah terpengaruhi, barulah ke saudara kerabat maupun tetangga sekitar. Tidak ada kriteria di partai ini, semua kalangan boleh ikut bergabung dengan kami....”

<sup>13</sup> Wawancara dengan Moch. Asrofi (sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri) di Kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri Jl. Airlangga 115 Katang



Partai politik akan kehilangan fungsinya sebagai wadah pendidik politik pada masyarakat jika tidak melakukan rekrutmen calon anggota, sudah menjadi hukum alam seperti manusia yang mengalami masa tua dan penurunan daya kemampuan sehingga membutuhkan regenerasi. Sama halnya dengan partai politik yang membutuhkan calon anggota yang profesional, memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi kepada partai serta kejujuran pribadi anggota. Pada Partai Perindo Kabupaten Kediri juga melakukan hal yang sama untuk membuat Partai Perindo menjadi partai yang kuat dan disegani masyarakat. Berdasarkan hal ini sasaran partai perindo untuk saat ini yaitu kalangan pemuda-pemuda yang mempunyai ide-ide pemikiran yang sangat kreatif, yang nantinya dididik untuk menjadi kader yang luar biasa untuk mensejahterakan Indonesia.

Sasaran masyarakat yang dituju untuk rekrutmen Partai Perindo adalah masyarakat menengah kebawah terutama masyarakat yang bergerak dibidang kewirausahaan seperti pedagang, penjual makanan, dan lain sebagainya karena cita-cita Partai Perindo adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam hal ini khususnya adalah masyarakat Kabupaten Kediri karena pada dasarnya Kabupaten Kediri terletak di tengah Provinsi Jawa Timur dan memiliki potensi basis massa yang besar dan mudah untuk dijangkau, Selain itu pemberian rombing gratis ini bertujuan untuk memunculkan perspektif di masyarakat bahwa Partai Perindo memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat yang masuk dalam kategori menengah kebawah. Hal ini dapat dijadikan sebagai daya tarik dan nilai jual tersendiri bagi Partai Perindo untuk ditawarkan kepada masyarakat Kabupaten Kediri.



Sasaran selanjutnya yang dituju oleh Partai Perindo adalah anak-anak muda karena anak-anak muda masih memiliki kreatifitas dan semangat yang tinggi dalam proses memajukan bangsa dan negara.<sup>14</sup>

“Sasaran kami saat ini adalah anak muda karena kami menilai memiliki kreatifitas dan semangat yang tinggi serta beban mereka pun masih sedikit jadi mereka bisa lebih fokus untuk partai yang baru ini”

Alasan ini dapat direalisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan dan program dengan memajukan wilayah sekitar khususnya Kabupaten Kediri, selain itu Partai Perindo juga menganggap regenerasi dalam partai lebih efektif dilakukan oleh anak-anak muda mengingat anak-anak muda tidak memiliki banyak beban seperti orang-orang dewasa pada umumnya terutama yang sudah berkeluarga. Dengan demikian harapan dari pengurus Partai Perindo Kabupaten Kediri nantinya proses penanaman nilai dan ideologi partai dapat dijalankan dengan baik dan lebih maksimal.

### **5.2.1 Kendala Rekrutmen Calon Anggota Partai DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri**

Proses perekrutan Partai Perindo Kabupaten Kediri menurut sekretaris partai tersebut tidak lepas dari hambatan dan kendala dalam proses perekrutannya. Kejadian ini sudah umum terjadi di lembaga-lembaga baik yang sudah lama berdiri maupun yang baru berdiri terutama di partai-partai politik. Tidak mudah untuk meyakinkan masyarakat karena seperti yang diketahui bahwa masyarakat akan melihat hasil nyata dari keberadaan partai-partai politik dan hal ini yang menjadi hambatan Partai Perindo Kabupaten Kediri selaku partai yang baru berdiri mengingat keberadaan Partai Perindo mulai ada tahun 2016 dan baru memiliki struktur organisasi yang saat ini masih belum memiliki ketua dan jajaran pengurus tetap dan

<sup>14</sup> Wawancara dengan Moch. Asrofi (sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri) di Kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri Jl. Airlangga 115 Katang



dapat berubah sewaktu-waktu jika dinilai jajaran kepengurusan partai tidak kompeten nantinya.

Kendala yang dihadapi pada DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri saat ini adalah sistem perekrutan calon anggota partai yang berbasis pemula atau pemilih muda yang kurang peduli dan bahkan malas untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Maka dari itu, DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri harus banyak turun ke masyarakat yang ingin masuk ke partai perindo yang mau diajak berjuang bersama-sama terlebih karena partai perindo merupakan partai yang baru dibentuk dan masih menata basis karena Partai Perindo menginginkan banyak anak muda yang masih baru untuk berada dalam partai tersebut.<sup>15</sup>

“.....semua partai politik akan mengalami hal yang sama mungkin dalam soal rekrutmen, apalagi sasaran yang dituju adalah anak muda. Anak muda jaman sekarang banyak yang kurang peduli partisipasinya terhadap partai politik, mereka cuek bahkan ora ngurus terhadap partai.....”

Tidak hanya masalah moral dari masyarakat yang menjadi sasaran perekrutan Partai Perindo yang menjadi masalah perekrutan, kendala lainnya yang dihadapi oleh DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri diantaranya adalah keterbatasan anggaran untuk kegiatan yang diperlukan untuk berbagai program kerja dan kegiatan DPD Partai Perindo sehingga hal itu menghambat atau tertundanya kegiatan yang ingin dilakukan. Berdasarkan pertimbangan keterbatasan anggaran tersebut maka DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri hanya dapat menjangkau sebagian kecil masyarakat Kabupaten Kediri, meski tidak ada syarat khusus dalam perekrutan bagi masyarakat, langkah yang diambil oleh jajaran DPD Partai Perindo adalah menyeleksi calon anggota berdasarkan keadaan ekonomi dari si calon anggota baru yang akan mendapatkan bantuan rombongan gratis dari Partai Perindo dikarenakan keterbatasan anggaran.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Moch. Asrofi (sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri) di Kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri Jl. Airlangga 115 Katang



## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berikut adalah paparan kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian pada bab-bab yang sebelumnya mengenai fokus permasalahan yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelembagaan DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri yang ditinjau dari empat aspek :
  - a. Akar partai di masyarakat. Dalam aspek ini DPD Partai Perindo telah mengadakan kegiatan seperti turnamen Bolla Volly, dan pembagian gerobak gratis untuk para pedagang yang kurang layak memiliki gerobak. Di kabupaten kediri meskipun belum terbentuknya anggota DPC secara tetap, mereka berusaha tetap mengupayakan agar partai perindo lebih dekat dengan masyarakat
  - b. Otonomi. Dalam aspek ini DPD Partai Perindo telah bekerja sama untuk pengambilan keputusan agar tidak ada perpecahan di kubu partai
  - c. Keorganisasian Partai Politik. Dalam aspek ini DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri tidak ada penyeleksian calon anggota dan aturan untuk mendaftar sebagai anggota pun sangat mudah, dengan menyerahkan foto copy KTP. Dan untuk saat ini mereka terus



berupaya untuk menambah jumlah anggotanya agar di dalam Verivikasi nanti mereka lolos

d. Koherensi. Dalam aspek ini DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri melakukan agar kader/anggotanya tidak melakukan lompat pagar nantinya dengan cara melakukan pendidikan politik

2. Dalam sistem rekrutmen yang dilakukan oleh DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri sudah berjalan sampai saat ini dan nantinya mereka akan dijadikan kader mulai dari kader pemula, kader dasar, kader madya dan kader paripurna. Namun untuk saat ini hanya ada kader madya dan kader paripurna yang ada di DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelebagaan oleh DPD Partai Perido Kabupaten Kediri adalah belum adanya pendanaan partai dari manapun kecuali dari pendiri partai, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya DPD Partai Perindo di Kabupaten Kediri, serta belum adanya penetapan DPC di setiap wilayahnya.

4. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi dalam rekrutmen yang dilakukan DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri adalah kurangnya masyarakat yang mengerti tentang DPD Partai Perindo di Kabupaten Kediri serta kurangnya minat anak muda saat ini yang terlihat cueg bahkan tidak mau tahu tentang partai politik.



## 6.2 Saran

Dengan fokus penelitian di lapangan mengenai pelembagaan dan rekrutmen politik di DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan untuk penelitian selanjutnya adalah :

1. Penelitian selanjutnya mengenai empat aspek pelembagaan dalam DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri sudah berjalan dengan seimbang dan maksimal. Sebab dalam penelitian ini DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri yang tergolong masih baru belum memiliki cara untuk penguatan kader serta belum adanya penyeleksian kader yang tepat dan ketat
2. Penelitian selanjutnya juga diharapkan sistem pengkaderan yang dilakukan DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri lebih sistematis. Untuk jenjang pendidikan politiknya, materi yang diberikan harus jelas dan berbobot sehingga dalam pengkaderannya dapat menghasilkan kader-kader yang militan
3. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperdalam kembali pembahasan tentang pelembagaan dan rekrutmen politik, karena DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri sangat baru, jadi konflik dalam pembahasan tersebut belum terlalu terlihat. Dimana mungkin penelitian selanjutnya dapat memfokuskan konflik-konflik yang sedang terjadi dalam DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Almond, Gabriel A. and Coleman, James S. 1966. *The Politics of Developing Areas*. News Jersey: Princeton University Press dalam Sudijono, Sastroatmodjo. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara – Jilid II*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_, 1981. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budi, Winarno. 2010. *Analisa dan Proses dalam Kebijakan Partai*. Jakarta. Pt Gramedia.
- David Marsh and Garry Stoker, *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*, terj, (New York: Palgrave MacMillan, 2002),
- Emy Susanti, Hendarso, 2007. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan Penelitian Kualitatif Sebuah Pengantar*. Jakarta : Prenada Media Group ,
- Fadillah Putra, 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ikhsan Darmawan, *Mengenal Ilmu Politik*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara. 2015,
- Inu Kencana, Syafie. 2009. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung : Pustaka Reka Cipta.
- Joko J. Prihatmoko, 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Semarang : Pustaka Pelajar.
- Koirudin, 2004. *Parpol dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.



- Lily Romli, 2005. *Pilkada Langsung, Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal*, Jakarta: Jurnal Analisis CSIS 34, No.3.
- Mathias Basedau dan Aleksander Stroh, *Measuring Party In Developing Countries*, Hamburg: GIGA German Institute Of Global And Area Studies, 2008, Hal. 8
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda.
- Norris, Pippa. 2006 . *Political Recruitmen* . Cambridge : Cambridge UP.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Building Political Parties: Reforming legal regulations and internal rules, Report for International IDEA*.
- Pamungkas, Sigit, 2011. *Teori dan Praktek Partai Politik Indonesia*. Institue for Democracy and Welfarism.
- Prastowo, Andi, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* . Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, Cetakan II.
- Ramses M, Andy.et al, 2009. *Politik Dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia
- Reuven, Hazan. 2001. *Candidate Selection Methods*. London : Sage Publication.
- Rush, Michael & Phillip, Althoff, 2000. *Pengantar Sosiologi Politik*. (diterjemahkan dari judul aslinya *Introduction to Political Sociology* oleh Kartini Kartono). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Ketujuh.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* Ed.rev, cet 14. Jakarta: Rineka Cipta..
- Suprihatini, Amin, 2008. *Partai Politik di Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih.
- Surbakti, Ramlan, 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syamsudin Haris, Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia , 2014, hal 51



## **Jurnal, Koran, dan Skripsi**

Alfan Alfian, "Partai Politik Dan Kepemimpinan Nasional", Jurnal Sekretariat Negara RI, No. 25, Maret 2013, hal.177

Azni, Besty Anindya, Nur. Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif: "*Studi Komparasi Antara Partai Amanat Nasional Dengan Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun 2014 Di Daerah Istimewa Yogyakarta*" Yogyakarta : Skripsi tidak (dipublikasikan) Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta.

Rizki khoiruly, 2013. Sistem Rekrutmen dan kaderisasi PDI Perjuangan di Kabupaten kendal : Skripsi tidak (dipublikasikan) Universitas Diponegoro.

Roni tamara, 2014. Sistem kaderisasi dan Penetapan calon anggota legislatif dalam pemilu 2009 (studi kasus partai golkar kabupaten penajam paser utara). Jurnal ilmu pemerintahan. Vol 2. No .1

Tobing, Andhika S.G, 2009. Kaderisasi dan Penetapan Caleg Partai Politik (Studi : DPD Partai Demokrat Propinsi Sumatera Utara Dalam Penetapan Caleg Pada Pemilu 2009 di Sumatera Utara). Medan : Skripsi tidak (dipublikasikan) Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

Undang-undang No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 34 ayat (3b)

## **Internet**

Akbar Tandjung, *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbelensi Politik Era Refoermasi, sebagaimana dikutip oleh Harja Saputra, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Survival Partai Politik"*, <http://www.harjasaputra.com/riset/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-survival-partai-politi.html>, diakses pada tanggal 26 juni 2017 pukul 19.30

[www.academia.edu/6790447/Kaderisasi\\_Dan\\_Penetapan\\_Caleg\\_Partai](http://www.academia.edu/6790447/Kaderisasi_Dan_Penetapan_Caleg_Partai), diakses 20 April, 2016

Fahmi Firdaus, "*Konsep Perindo: kembali ke Tujuan Berbangsa & Bernegara*", <http://news.Okezone.com/read/2015/12/25/337/1274621/konsep-perindo-kembali-ke-tujuan-berbangsa-bernegara>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2016

Abdul Khaliq, "*Mengenal Platfrom Partai Perindo*", <http://nasional.sindonews.com/read/960819/18/mengenal-platfrom-partai-perindo-1423193546/1>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2016



*Mardiansyah, "Perindo: Menggagas Politik Kesejahteraan",  
<http://nasional.sindonews.com/read/964314/18/perindo-menggagas-politik-kesejahteraan-1423880499/1>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2016  
<http://muspiarsaputra.blogspot.co.id/2010/12/paper-pendekatan-dalam-ilmu-politik.html>*